

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 290 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CILENGKRANG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CILENGKRANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Cilengkrang untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Cilengkrang untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP
RENSTRA KECAMATAN CILENGKRANG

Pasal 2

Dokumen Renstra Kecamatan Cilengkrang merupakan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Cilengkrang untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cilengkrang yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Cilengkrang yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Kecamatan Cilengkrang bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cilengkrang dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Kecamatan Cilengkrang dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Kecamatan Cilengkrang agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Kecamatan Cilengkrang;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Cilengkrang;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Kecamatan Cilengkrang.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA KECAMATAN CILENGKRANG

Pasal 4

(1) Renstra Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kecamatan Cilengkrang dalam menyusun Renja Kecamatan Cilengkrang.

(2) Renstra Kecamatan Cilengkrang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
   1. latar Belakang;
   2. dasar hukum penyusunan;
   3. maksud dan tujuan; dan
   4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Cilengkrang paling sedikit memuat:
   1. gambaran pelayanan Kecamatan Cilengkrang; dan
   2. permasalahan dan isu strategis Kecamatan Cilengkrang.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
   1. tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025-2029;
   2. strategi Kecamatan Cilengkrang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
   3. arah kebijakan Kecamatan Cilengkrang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
   1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
   2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
   3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Cilengkrang; dan
   4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
   1. kesimpulan;
   2. kaidah pelaksanaan; dan
   3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Kecamatan Cilengkrang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KECAMATAN CILENGKRANG

Pasal 5

(1) Kecamatan Cilengkrang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Cilengkrang dan evaluasi hasil Renstra Kecamatan Cilengkrang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.
(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Cilengkrang terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Cilengkrang.
(3) Camat Cilengkrang menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Kecamatan Cilengkrang.
(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN CILENGKRANG

Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Cilengkrang dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Kecamatan Cilengkrang mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Kecamatan Cilengkrang dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Kecamatan Cilengkrang, maka Renstra Kecamatan Cilengkrang dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Kecamatan Cilengkrang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Kecamatan Cilengkrang terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Kecamatan Cilengkrang.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 290

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 290 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CILENGKRANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CILENGKRANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CILENGKRANG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.”

Renstra Kecamatan Cilengkrang adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk pariode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Cilengkrang merupakan bagian krusial dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Renstra menjadi dokumen perencanaan operasional yang menjabarkan visi, misi, dan tujuan kepala daerah ke dalam program dan kegiatan yang lebih spesifik, terukur, dan realistis sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing perangkat daerah.

Penyusunan Dokumen Renstra oleh perangkat daerah bertujuan untuk :

1. Sebagai Pedoman Pembangunan Jangka Menengah
   Renstra menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan, serta dalam menetapkan prioritas pembangunan dan penganggaran secara konsisten selama lima tahun.

2. Menjabarkan Arah Kebijakan Kepala Daerah

   Renstra membantu menerjemahkan visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam sasaran dan strategi sektoral yang sesuai dengan peran masing-masing perangkat daerah.

3. Menjamin Koordinasi dan Sinkronisasi Program

   Dengan adanya Renstra, perangkat daerah dapat menyelaraskan rencana kerjanya dengan RPJMD, Renstra perangkat daerah lainnya, dan program pembangunan pusat, sehingga tercipta sinergi antar sektor.

4. Sebagai Alat Evaluasi dan Pengukuran Kinerja

   Renstra memuat indikator kinerja utama (IKU) dan target yang menjadi dasar untuk menilai capaian kinerja perangkat daerah dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan evaluasi lainnya.

5. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Dokumen

   Renstra yang terbuka dan partisipatif menunjukkan komitmen perangkat daerah terhadap perencanaan yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan *stakeholder*.

6. Menyesuaikan dengan Dinamika dan Tantangan Pembangunan

   Renstra memungkinkan perangkat daerah untuk merespons tantangan baru dan isu strategis, seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi, atau dampak pandemi, melalui penyesuaian strategi dan program yang adaptif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memberikan arah, pedoman, dan prioritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dalam lima tahun ke depan. Renstra ini menjadi acuan penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Adapun ketentuan mengenai tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang

merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra.

Dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 disebutkan bahwa Dokumen perencanaan Pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan subtansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD) Perencanaan juga disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana Dokumen perencanaan Pembangunan menengah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD).

Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Bapperida Kabupaten Bandung, sedangkan penyusunan Renstra PD disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Renstra PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Pemerintah Kabupaten Bandung telah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 dan dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2025-2029.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung mengacu kepada RPJPD Kabupaten Bandung 2025-2045, visi, misi dan prioritas Bupati terpilih dan rancangan rencana teknokratik. Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung berkewajiban menyusun Renstra. Renstra dimaksud disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Bandung, yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*). Analisa lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama ini berkembang dan belum dapat terpecahkan, sedangkan analisa lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi.

Renstra dimaksudkan untuk mengembangkan strategi secara efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi pengambilan keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus berubah. Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan berpedoman kepada RPJMD, serta bersifat indikatif. Renstra juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan Cilengkrang hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman atau kerangka berpijak Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan organisasi dengan dasar kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal organisasi disusun dengan melibatkan *stakeholder* pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029.

Selanjutnya Renstra ini merupakan dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan. Untuk itu penyusunan Renstra Kecamatan Cilengkrang sekurang-kurangnya memperhatikan/ mengacu pada perspektif keuangan, perspektif pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi, perspektif pemberdayaan organisasi dan perspektif harapan pelanggan pengguna layanan Kecamatan Cilengkrang.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Cilengkrang diawali dengan tahapan persiapan penyusunan Renstra yang meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Kecamatan Cilengkrang, orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Renstra, penyusunan akhir Renstra dan penetapan Renstra Kecamatan Cilengkrang.

Gambar 1.1 Diagram Penyusunan Renstra PD



Sumber : Penyusunan Renstra PD Kab. Bandung oleh Holan Pasaribu

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah, landasan hukum tersebut yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 100);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
20. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

- Penyusunan Renstra Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029 agar mempunyai pedoman perencanaan strategis dalam mewujudkan aparatur yang kompeten melalui pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan kualitas aparatur sipil negara dan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- penyusunan Renstra Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029 adalah menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka menengah tahun 2025 - 2029 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik.

1.3.2 Tujuan

1. Menjabarkan arahan dan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029 ke dalam rencana kerja pemerintah daerah;

2. Menjabarkan tujuan, sasaran dan program kerja operasional Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029;
3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Cilengkrang, menjaga eksistensi organisasi dan sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada *stakeholder* mengenai penggunaan sumber daya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjabarkan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2025 - 2029 agar menjadi lebih optimal untuk mencapai target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan khususnya mengenai penyelenggaraan pemerintahan umum di Kabupaten Bandung;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumberdaya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan; dan
4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN CILENGKRANG

Bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Cilengkrang paling sedikit memuat:

1. gambaran pelayanan Kecamatan Cilengkrang; dan
2. permasalahan dan isu strategis Kecamatan Cilengkrang.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:

1 tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025-2029;dan

2 Strategi Kecamatan Cilengkrang Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025-2029; dan

3 Arah Kebijakan Kecamatan Cilengkrang Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan

bidang urusan paling sedikit memuat:

1 Uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;

2 Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Cilengkrang; dan

4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci;

5 Inovasi Kecamatan Cilengkrang.

BAB V PENUTUP

Bab V penutup paling sedikit memuat:

1. Kesimpulan
2. Kaidah Pelaksanaan; dan
3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN CILENGKRANG

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Cilengkrang

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Cilengkrang

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor. 1 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung serta Peraturan Bupati No. 120 tahun 2023 tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, kedudukan kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Cilengkrang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
b. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan;

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit Organisasi pada Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 tahun 2022. Untuk Wilayah Kecamatan Cilengkrang Camat membawahkan :

a. Sekretariat
b. Seksi Pemerintahan
c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
e. Seksi Pembangunan
f. Seksi Sosial Budaya
g. Kasubag Umum dan Kepegawaian
h. Kasubag Program dan Keuangan
i. Jabatan Fungsional

Adapun tugas pokok dan fungsi perangkat Kecamatan Cilengkrang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta, evaluasi dan pelaporan, dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Sekretaris mempunyai fungsi :

1) penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
2) pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
3) penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
4) penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
5) penyelenggaraan dan pengkoordinasian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
6) penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
7) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

b. Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Pemerintahan Menyelenggarakan Fungsi :

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
2) penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
3) pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pemerintahan;
4) pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.

C. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Menyelenggarakan Fungsi :

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
2) penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3) pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
4) pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

D. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan Fungsi :

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2) penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3) pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4) pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
5) pelaksanaan tugas tambahan *ex-officio* Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
6) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

E. Seksi Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pembangunan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan Fungsi :

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan;
2) penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan;
3) pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pembangunan;
4) pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembangunan.

F. Seksi Sosial Budaya

Kepala Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sosial Budaya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan Fungsi :

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya;
2) penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sosial Budaya;
3) pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Sosial Budaya;
4) pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya;
5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sosial Budaya.

G. Kepala Subbagian Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana dan program serta pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Subbagian Program dan Keuangan menyelenggarakan Fungsi :

a. penyusunan bahan perencanaan dan pelayanan administrasi perencanaan dan bahan rencana anggaran Kecamatan;
b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan Kecamatan;
c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Kecamatan;
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Program dan Keuangan.

H. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, menyiapkan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan Fungsi :

a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

I. JABATAN FUNGSIONAL

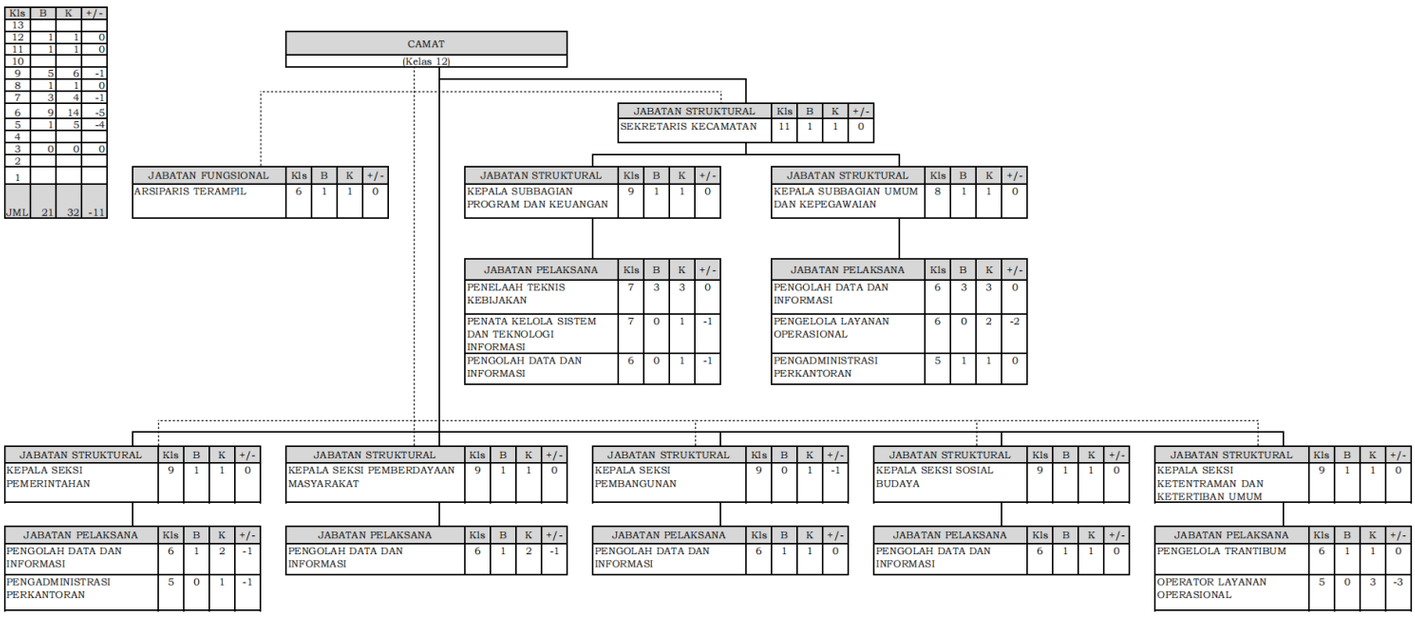
Pengaturan pembentukan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Camat.
3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

4. Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan kecamatan.
5. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
6. Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 120 tahun 2023 tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, susunan Kecamatan Organisasi Cilengkrang Kabupaten Bandung terdiri atas :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Cilengkrang



Sumber : Hasil analisis Kecmatan Cilengkrang 202

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Cilengkrang

Kecamatan Cilengkrang sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat bergantung pada ketersediaan serta kualitas sumber daya yang dimiliki. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia aparatur serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Berikut gambaran sumber daya yang dimiliki Kecamatan Cilengkrang.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung memiliki pegawai sebanyak 24 orang. Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan, Eselon IV sebanyak 7 orang, Pelaksana sebanyak 15 orang dengan jumlah pelaksana berada di Seksi dan Subbag.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Cilengkrang , sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan Kecamatan Cilengkrang

No.	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1.	Pria			2	4	8	14
2.	Wanita			0	3	5	8
	Jumlah			2	7	13	22

Sumber : Sekretariat Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025

Tabel 2.2. Pegawai Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2025

No	Golongan		Status Kepegawaian			Jumlah	%
			PNS	CPNS	PPPK		
1	Gol I	Pria	0	0	0	0	0 %
		Wanita	0	0	0	0	0 %
2	Gol II	Pria	6	0	0	6	27,27%
		Wanita	4	0	0	4	18,18%
3	Gol III	Pria	4	1	0	5	22,72%
		Wanita	3	0	0	3	13,64%
4	Gol IV	Pria	2	0	0	2	9,09 %
		Wanita	0	0	0	0	0%
5	Kelas 7	Pria	0	0	1	1	4,5%
		Wanita	0	0	1	1	4,5%
	Jumlah		21	1	2	22	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.2. di atas maka pegawai Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 0 %, Golongan II sebanyak 46,45 %, Golongan III sebanyak 36,36 % dan Golongan IV sebanyak 9,09 %, dan kelas 7 PPPK sebanyak 9 %

melihat komposisi tersebut, pagawai Kecamatan Cilengkrang didominasi oleh golongan II dan III.

2.1.2.2 Aset kecamatan Cilengkrang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung di tunjang dan di dukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.3 Aset Kecamatan Cilengkrang Periode Desember 2024

NO.	JENIS ASET	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN SD 31 DESEMBER 2024	NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2024
1	Tanah	315,250,000	0	315,250,000
2	Peralatan dan Mesin	1,215,804,337	1,118,408,412	97,395,925
3	Gedung dan Bangunan	2,417,787,360	637,973,086	1,779,814,274
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Kontruksi dalam pengerjaan	0	0	0
	Jumlah Aset Tetap	3,948,841,697	1,756,381,498	2,192,460,199
7	Aset Tak Berwujud	0	0	0
8	Aset Lain-lain/Rusak Berat	702,668,572	672,563,644	30,104,928
9	Aset yang dimanfaatkan pihak lainnya	0	0	0
10	Total Aset Lainnya	702,668,572	672,563,644	30,104,928

NO.	JENIS ASET	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN SD 31 DESEMBER 2024	NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2024
11.	Total Aset tetap + Aset Lainnya	4,651,510,269	2,428,945,142	2,222,565,127
JUMLAH ASET KONDISI RUSAK BERAT				702,668,572
JUMLAH TOTAL ASET				4,651,510,269
JUMLAH KONDISI ASET BAIK				3,948,841,697
PERSENTASE BMD DALAM KONDISI BAIK				84.89%

Sumber : Sekretariat Kecamatan Cilengkrang 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase BMD dalam Kondisi Baik pada Akhir Tahun 2024 sebesar 84.89% hal ini belum sejalan dengan target renja Kecamatan sebesar 86 % yang menunjukan bahwa pengelolaan BMD di Kecamatan Cilengkrang belum berjalan dengan baik.

Hal ini dikarenakan masih banyaknya asset BMD dalam kondisi rusak berat belum ditindaklanjuti untuk dilakukan penghapusan. Sehingga hal ini menjadi beban kecamatan dalam melakukan pengamanan barang milik daerah.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung

Pembangunan di wilayah Kecamatan merupakan bagian integral dari Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan lebih luas kepada Daerah, terutama Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas Pemerintah dan pembangunan yang bersifat multi sektoral.

Untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas perencanaan, maka kecamatan Cilengkrang perlu memperkuat proses konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean governance*, serta didukung oleh kinerja aparatur.

Kinerja pelayanan kecamatan erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati No. 120 tahun 2023 tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung No.1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

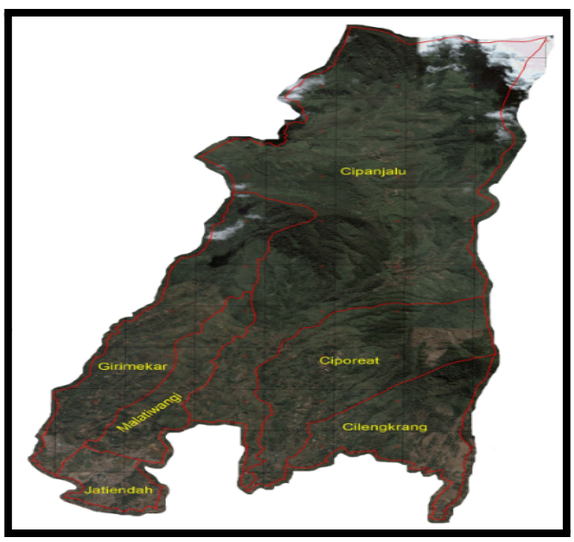
2.1.3.1 Data-Data dan Informasi terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Cilengkrang.

a. Kondisi Geografis

Kecamatan Cilengkrang adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung yang merupakan wilayah hasil pemekaran perubahan batas wilayah berdasarkan PP No. 16 Th. 1987, dibentuk pada tahun 1989 sebagai pemekaran dari Kecamatan Ujung Berung daerah Cilengkrang berfungsi sebagai kawasan jasa dan perdagangan, pertanian, permukiman, pariwisata dan konservasi yang tetap mempertahankan fungsi lindung pada kawasan Bandung Utara. Adapun Batas Wilayah Kecamatan Cilengkrang :

- Utara : Wilayah Kecamatan Lembang
- Timur : Wilayah Kecamatan Cileunyi
- Selatan : Wilayah Kecamatan Ujung Berung
- Barat : Wilayah Kecamatan Cimenyan

Gambar 2.2. Peta Wilayah Kecamatan Cilengkrang



Sumber : Data Kasie Pemerintahan Kec. Cilengkrang 2024

Letak geografis Kecamatan Cilengkrang terletak pada 107° 38‘ - 107° 42’ Bujur Timur dan 6° 49’ - 6° 54 ‘ Lintang Selatan, sedangkan berdasarkan topografinya sebagian besar wilayah di Kecamatan Cilengkrang merupakan daerah Lereng/Punggung Bukit dan ada juga daerah dataran sebab daerah kawasan desa membentang dari perbatasan kawasan hutan sampai dengan Perbatasan dengan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, dengan ketinggian diatas permukaan laut bervariasi dari 600 m sampai 1.400 m. Dengan luas 31,78 Km2, Kecamatan Cilengkrang terdiri dari 6 desa dengan Desa Cipanjalu sebagai desa terluas, (63,5%), disusul oleh Desa Cilengkrang sebesar (13,75%). Sedangkan Desa Melatiwangi dan Jatiendah merupakan desa dengan wilayah terkecil, yaitu masing- masing hanya menempati sekitar 3,85% dan 4,05% dari keseluruhan wilayah Kecamatan Cilengkrang.

Jarak ibukota Kabupaten Bandung ke ibu kota Kecamatan Cilengkrang adalah sekitar 28 Km. Beberapa Desa memiliki jarak di atas 28 Km ke ibukota Kabupaten Bandung antara lain: Desa Cipanjalu, Ciporeat dan Cilengkrang.

b. Kondisi Demografi

Penduduk merupakan bagian penting dari sebuah komponen perencanaan pembangunan maka kependudukan merupakan salah satu isu penting dalam perencanaan maupun evaluasi hasil pembangunan. Berbagai indikator kependudukan dapat digunakan untuk melihat kondisi suatu wilayah, seperti adanya laju pertumbuhan, kepadatan penduduk, penduduk menurut kelompok umur serta indikator-indikator lainnya.

Dari berbagai indikator tersebut maka masalah kependudukan di dalam proses pembangunan dapat diidentifikasi dan dievaluasi. Adapun komposisi jumlah penduduk Kecamatan Cilengkrang berdasarkan hasil Data Konsolidasi bersih Kemendagri Semester 2 Tahun 2022 ini tercatat 53.733 jiwa, dengan *sex ratio* 103 yang artinya jumlah penduduk Laki-laki 3 persen lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk Perempuan. Kepadatan penduduk di Kecamatan Cilengkrang pada tahun 2022 tercatat kurang lebih sebesar 1.693 jiwa/ km2.

c. Potensi Kecamatan

Potensi daerah yang menjadi kewenangan kecamatan mencakup potensi lokal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau walikota kepada camat sebagai perangkat daerah. Meskipun kewenangan kecamatan terbatas (bukan otonom), kecamatan tetap berperan penting dalam mendayagunakan potensi lokal untuk pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Potensi daerah yang menjadi kewenangan kecamatan meliputi:

1. Potensi Sosial dan Kependudukan
2. Potensi Ekonomi Lokal
3. Potensi Sumber Daya Alam Lokal
4. Potensi Wisata Lokal
5. Potensi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
6. Pelayanan Administratif

Kecamatan Cilengkrang merupakan salah satu wilayah strategis di Kabupaten Bandung yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dari berbagai aspek, seperti geografis, sumber daya alam, ekonomi, hingga sosial budaya. Secara geografis, Kecamatan Cilengkrang berada di kawasan timur Kabupaten Bandung dan berbatasan langsung dengan wilayah Kota Bandung, menjadikannya sebagai daerah penyangga yang strategis dalam mendukung pertumbuhan kawasan perkotaan serta mobilitas masyarakat dan distribusi barang dan jasa.

Dari sisi Sumber Daya Alam (SDA), Kecamatan Cilengkrang memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga lereng perbukitan yang berada di kaki Gunung Manglayang. Kondisi ini memberikan keunggulan ekologis sekaligus potensi untuk pengembangan sektor pertanian, hortikultura, dan kehutanan. Keberadaan sumber mata air dan hutan lindung juga memperkuat fungsi kawasan sebagai penyangga lingkungan sekaligus membuka peluang untuk pengembangan ekowisata berbasis alam dan konservasi.

Dalam aspek ekonomi dan UMKM, masyarakat Kecamatan Cilengkrang menunjukkan dinamika ekonomi yang cukup aktif, khususnya dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Berbagai jenis usaha berkembang, seperti kuliner tradisional, usaha pertanian terpadu, peternakan rakyat, kerajinan, serta sektor jasa. Potensi ekonomi ini dapat diperkuat melalui program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, serta

dukungan terhadap pemasaran dan digitalisasi UMKM, agar mampu bersaing dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Di sektor pariwisata, Kecamatan Cilengkrang memiliki sejumlah daya tarik alam yang potensial, seperti kawasan wisata alam Curug Batu Templek, jalur pendakian Gunung Manglayang, serta kawasan perbukitan dengan pemandangan alam yang asri. Keunikan potensi alam ini dapat menjadi modal penting dalam pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat yang mengedepankan pelestarian lingkungan, penguatan budaya lokal, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Aspek infrastruktur di Kecamatan Cilengkrang juga terus mengalami perkembangan. Jalan utama dan jalan lingkungan yang menghubungkan desa-desa dengan pusat kota dan kawasan sekitarnya telah tersedia, meskipun masih memerlukan peningkatan kualitas dan perawatan. Akses terhadap jaringan listrik, air bersih melalui SPAM, serta jaringan telekomunikasi relatif sudah mencakup sebagian besar wilayah. Pelayanan dasar masyarakat juga didukung oleh keberadaan fasilitas pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga menengah, serta fasilitas kesehatan seperti puskesmas, posyandu, dan klinik. Keberadaan kantor kecamatan, balai desa, serta pos keamanan seperti Polsek dan Koramil turut memperkuat layanan administrasi dan ketertiban wilayah.

Dalam bidang sosial dan budaya, Kecamatan Cilengkrang dikenal memiliki kehidupan masyarakat yang harmonis dengan nilai-nilai gotong royong yang masih kuat. Tradisi dan budaya lokal, seperti kesenian Sunda, upacara adat, serta kegiatan keagamaan dan sosial masih lestari dan menjadi bagian dari identitas masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat seperti karang taruna, majelis taklim, dan lembaga adat memainkan peran penting dalam pembangunan sosial, pendidikan nonformal, serta pemberdayaan masyarakat.

Secara keseluruhan, Kecamatan Cilengkrang memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara terpadu dan berkelanjutan. Dukungan dari pemerintah daerah, sektor swasta, serta partisipasi aktif masyarakat akan menjadi kunci dalam mengoptimalkan seluruh potensi tersebut, guna menciptakan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan alat ukur dalam menilai sejauh mana pelaksanaan tugas Kecamatan Cilengkrang berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada periode 2021–2024 memberikan gambaran mengenai efektivitas program, kualitas pelayanan publik, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan.

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan tren peningkatan, terutama pada aspek pelayanan administrasi kependudukan dan koordinasi pembangunan wilayah. Namun, terdapat fluktuasi pada indikator kepuasan masyarakat dan ketepatan waktu pelayanan, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi *COVID-19* pada awal periode, serta keterbatasan sumber daya manusia.

Tabel 2.4 Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cilengkrang Tahun 2021- 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cilengkrang Tahun 2021- 2026								
			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai AKIP	70	72,06	107,53%	72	76,08	105,66%	77	79,80	92,00%
		Persentase BMD dalam kondisi baik	84	83,63	99,55%	85	83,66	98,03%	85	85	41,32%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai IKM (*IKU)	78	78,62	92,23%	80	80,03	100,03%	82	82	82,59%
	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Jumlah Desa Cepat Berkembang (*IKU)	1.00	1.00	100%	100	95	95%	1.00	1.00	100%

Sumber : Hasil analisis Kecamatan Cilengkrang 2025

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, kemudian adanya Perubahan Renstra Kecamatan Cilengkrang Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2022 tentang Renstra Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, terdapat perubahan pada indikator sasaran Meningkatnya kualitas pemerintahan desa dimana sebelumnya Persentase desa beradministrasi baik menjadi Jumlah Desa Cepat Berkembang.

`Secara umum, indikator yang ditetapkan selama periode tersebut telah menunjukkan capaian tinggi, bahkan konsisten mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Kecamatan Cilengkrang Tahun 2021-2026. Terutama pada indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cilengkrang yaitu nilai IKM yang setiap tahunnya konsisten mengalami peningkatan. Adapun IKU Jumlah Desa Cepat Berkembang belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan baru dilaksanakan pada tahun 2024. Berikut tingkat capaian kinerja program penunjang dan kewilayahan sebagaimana yang terdapat pada Perubahan Renstra Kecamatan Cilengkrang Tahun 2021-2026.

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian dan Kinerja Yang Menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Cilengkrang Pada Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan.

Secara keseluruhan, Kecamatan Cilengkrang menunjukkan kinerja yang baik dan produktif dalam mendukung tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam aspek akuntabilitas pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan kapasitas pemerintahan desa. Nilai AKIP dan IKM yang cenderung melampaui target menggambarkan adanya komitmen aparatur terhadap perbaikan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Meski demikian, beberapa indikator seperti kondisi BMD memerlukan perhatian khusus, baik dari sisi manajemen aset maupun pencatatan dan pelaporan. Ke depan, diperlukan upaya lebih dalam menjaga keberlanjutan capaian kinerja, memperkuat monitoring dan evaluasi internal, serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Tahun 2023 merupakan Tahun ketiga RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dari kepemimpinan bupati Bandung. Selama masa itu kinerja pelayanan Kecamatan Cilengkrang mengacu pada tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2021-2026 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung

No	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Nilai Sakip Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	70 point 84 %	71 point 85 %	77 point 86%	79 point 87%	80 point 88 %	72,06 Poin 83,63%	76.08 point 85 %	79,80 point 84,89%	0 point 0 %	0 point 0 %	90,00%	0,00%	92,00%	0,00%	0,00%
	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	8 dokumen	Dokumen	Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

No	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD															
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	na	na	na	1 Dokumen	1 Dokumen	na	na	na			0,00%	0,00%	0,00%		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	na	na	na	1 dokumen	1 dokumen	na	na	na			0,00%	0,00%	0,00%		
	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

No	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/ bulan	24 orang/bulan	24 orang/bulan	24 orang/bulan	24 orang/bulan	24 orang/ 14 bulan	24 orang/ 14 bulan	24 orang/ 12 bulan	orang/bulan	orang/bulan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	dokumen	Dokumen	NA	Dokumen	Dokumen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dokumen	Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	Dokumen	Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	90%	0%	100%	0%	0%	75,00%	75,00%	75,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	laporan	laporan	75,00%	75,00%	75,00%	0,00%	0,00%
	Persentase Capaian PAD	100%	100%	100%	100%	100%	20%	0%	0%	0%	0%	45.50%	45.50%	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 laporan	12 laporan	laporan	laporan	laporan	5 laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	45.50%	45.50%	0,00%	0,00%	0,00%
	persentase dokumen pelaksanaan administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	75%	0%	80%	0%	0%	80,00%	80,00%	80,00%	0,00%	0,00%

No	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu															
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	paket	paket	1 paket	1 paket	paket	paket	PAKET	paket	paket	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20 Dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	Dokumen	6 dokumen	Dokumen	Dokumen	80,00%	80,00%	80,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	24 orang	24 orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	90%	0%	75%	0%	0%	80,00%	100,00%	75,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	12 paket	8 paket	paket	paket	90,00%	100,00%	75,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	12 paket	10 paket	paket	paket	90,00%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peket	Peket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	12 paket	6 paket	paket	paket	0,00%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik	Peket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	9 paket	paket	paket	0,00%	100,00%	70,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	10 paket	9 paket	paket	paket	90,00%	90,00%	60,00%	0,00%	0,00%

No	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	paket	paket	paket	paket	paket	paket	Paket	paket	paket	95,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	1 Laporan	laporan	Laporan	Laporan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	21 laporan	Laporan	Laporan	60,00%	95,00%	90,00%	0,00%	0,00%
	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83%	84%	85%	86%	87%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%!	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	unit	unit	1 unit	1 unit	unit	unit	unit	unit	unit	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Paket	Paket	1 Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	0,00%!	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	unit	unit	1 unit	1 unit	unit	unit	unit	unit	unit	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	unit	unit	1 unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang	100%	100%	100%	-	-	100%	-	100%	-	-	111,66%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

No	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Urusan Pemerintahan Daerah															
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	laporan	laporan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	laporan	laporan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	83%	84%	85%	86%	87%	75%	0%	85%	0%	0%	75,34%!	75,34%!	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit mobil 4 motor	3 unit mobil 4 motor	2 unit mobil 4 motor	2 unit mobil 4 motor	2 unit mobil 4 motor	2 unit mobil 4 motor	2 unit mobil / 4 unit motor	2 unit mobil 4 motor	unit mobil / unit motor	unit mobil / unit motor	70,00%	90,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit/tahun	10 unit/tahun	10 unit/tahun	10 unit/tahun	10 unit/tahun	6 unit/tahun	8 unit / tahun	4 unit/tahun	unit / tahun	unit / tahun	80,00%	60,00%	50,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	unit	unit	unit	unit	unit	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara	Unit	Unit	Unit	2 unit	2 unit	unit	unit	unit	unit	unit	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	78 poin	80 poin	82 poin	84 poin	86 poin	86 poin	o poin	82 Poin	o poin	o poin	90,00%	82,59%!	90,00%	0,00%	0,00%

No	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	1 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	90%	0%	100%	0%	0%	90,00%	88,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	laporan	6 Laporan	-	-	-	laporan	-	laporan	-	-	0,00%	#REF!	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 Laporan	laporan	laporan	90,00%	#REF!	0,00%	0,00%	0,00%
	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	90%	0%	75%	0%	0%	95,00%	45,00%	80,00%	0,00%	0,00%

No	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1 Laporan	3 Dokumen	1 Laporan	Dokumen	Dokumen	95,00%	45,00%	80,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	1 unit					1 Laporan		-			#REF!	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	85%	0%	100%	0%	0%	80,00%	90,00%	90,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9 laporan	9 laporan	9 laporan	9 laporan	7 laporan	7 laporan	8 laporan	3 Laporan	-	-	80,00%	90,00%	90,00%	0,00%	0,00%
	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	82 poin	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	100%	0,00%	0,00%	75,00%	75,00%	90,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 lembaga	2 lembaga	lembaga	lembaga	lembaga	2 lembaga	lembaga	lembaga	lembaga	lembaga	75,00%	#REF!	0,00%	0,00%	0,00%

No	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Jumlah laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	#REF!	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 laporan	kegiatan	kegiatan	90,00%	85,00%	90,00%	0,00%	0,00%
	persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	100%		100%	100%	100%	0%	80%	0%	0%	75,00%	70,00%	70,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	laporan	2 Laporan	2 lembaga	Laporan	Laporan	#REF!	70,00%	75,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	3 Laporan	laporan	Laporan	Laporan	#REF!	#REF!	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	0,00%	#REF!	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	kelurga	kelurga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

No	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara															
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	kelurga	kelurga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	kelurga	kelurga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	kelurga	kelurga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

No	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	kelurga	kelurga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	kelurga	kelurga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	kelurga	kelurga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

No	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	kelurga	kelurga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	kelurga	kelurga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	kelurga	kelurga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	kelurga	kelurga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	kelurga	kelurga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

No	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas															
	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	82 poin	0%	0%	65,00%	65,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	15,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	2 laporan	2 laporan	laporan	laporan	laporan	15,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	70%	0%	0%	95,00%	100,00%	70,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	9 laporan	laporan	laporan	95,00%	100,00%	70,00%	0,00%	0,00%

No	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	82 poin	0%	0%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	90,00%	90,00%	90,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang	-	-	-	-	270 orang	-	-	-	-		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	-	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	orang	220 orang	300 Orang	orang	orang	0,00%	90,00%	90,00%	0,00%	0,00%

No	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	270 orang	150 orang	300 Orang	orang	orang	87,86%	90,00%	90,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	Dokumen	Dokumen	0,00%	75,00%	80,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	laporan	12 Dokumen	12 dokumen	Dokumen	Dokumen	0,00%	90,00%	80,00%	0,00%	0,00%
	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	80,00%	87,86%	90,00%	0,00%	0,00%
	Persentase desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	80,00%	85,00%	90,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 Dokumen	6 dokumen	Dokumen	Dokumen	75,00%	85,00%	90,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	4 Dokumen	6 dokumen	Dokumen	Dokumen	80,00%	90,00%	90,00%	0,00%	0,00%

No	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	0 dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 dokumen	Dokumen	Dokumen	0,00%	100,00%	90,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0 Dokumen	0 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Cilengkrang 2025

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.048.789.000,00	4.987.227.332,00	5.334.228.408,00	5.567.716.233,00	5.135.045.162,00	4.843.235.153,00	4.924.390.855,00	4.936.406.922,00	0,00	0,00	95,93%	98,74%	92,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.995.000,00	45.770.000,00	51.379.800,00	42.548.800,00	49.627.300,00	54.888.600,00	43.500.000,00	40.046.000,00	0,00	0,00	83,17%	95,04%	77,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.999.000,00	12.430.000,00	25.829.800	12.863.600,00	14.362.000,00	20.113.800,00	12.340.000,00	19.366.800,00	0,00	0,00	80,46%	99,28%	74,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21.999.000,00	5.850.000,00	3.670.000,00	3.648.000,00	3.140.400,00	19.331.300,00	5.670.000,00	3.006.800,00	0,00	0,00	87,87%	96,92%	81,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.999.000,00	5.850.000,00	4.000.000,00	4.702.500,00	5.690.400,00	1.893.900,00	5.630.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	63,15%	96,24%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.999.000,00	4.400.000,00	3.120.000,00	2.005.500,00	3.140.400,00	2.977.000,00	2.880.000,00	1.415.000,00	0,00	0,00	74,44%	65,45%	45,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.999.000,00	4.400.000,00	3.120.000,00	4.385.500,00	5.690.400,00	3.998.900,00	4.270.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	100,00%	97,05%	81,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	6.990.000,00	5.140.000,00	4.060.500,00	4.053.300,00	4.036.300,00	6.980.000,00	4.801.800,00	0,00	0,00	80,73%	99,86%	93,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	5.850.000,00	6.500.000,00	8.374.000,00	8.990.400,00	2.537.400,00	5.730.000,00	4.905.600,00	0,00	0,00	84,58%	97,95%	75,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0,00	0,00	0,00	1.254.600,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	0,00	0,00	0,00	1.254.600,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.633.818.000,00	4.500.053.032,00	4.788.507.248,00	4.999.313.548,00	4.605.926.500,00	4.464.379.877,00	4.463.571.059,00	4.546.296.988,00	0,00	0,00	96,34%	99,19%	94,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.626.648.000,00	4.491.733.032,00	4.779.807.448,00	4.987.843.048,00	4.596.100.000,00	4.457.900.477,00	4.456.151.059,00	4.538.977.188,00	0,00	0,00	96,35%	99,21%	94,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0,00	0,00	0,00	4.330.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	4.500.000,00	2.999.800,00	4.325.500,00	4.006.500,00	2.755.000,00	4.280.000,00	2.919.800,00	0,00	0,00	91,83%	95,11%	97,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.170.000,00	3.820.000,00	5.700.000,00	2.815.000,00	3.300.000,00	3.724.400,00	3.140.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	89,31%	82,20%	77,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.000.000,00	8.090.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	3.300.000,00	2.114.900,00	7.630.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	70,50%	94,31%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.000.000,00	8.090.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	3.300.000,00	2.114.900,00	7.630.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	70,50%	94,31%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Administrasi pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	3.000.000,00	0,00	0,00			1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.000.000,00	45.678.300,00	11.700.000,00	32.296.000,00	36.920.000,00	2.282.500,00	45.008.300,00	7.692.000,00	0,00	0,00	76,08%	98,53%	65,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.000.000,00	5.300.000,00	11.700.000,00	10.296.000,00	11.920.000,00	2.282.500,00	4.630.000,00	7.692.000,00	0,00	0,00	76,08%	87,36%	65,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	40.378.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.378.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.997.000,00	97.490.700,00	112.891.340,00	111.110.650,00	89.136.442,00	71.068.100,00	93.403.400,00	55.948.040,00	0,00	0,00	85,63%	95,81%	49,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	5.995.600,00	5.998.700,00	5.999.200,00	5.999.600,00	5.566.400,00	5.995.600,00	4.410.800,00	0,00	0,00	92,77%	100,00%	73,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	48.918.000,00	56.235.100,00	74.148.900,00	34.913.800,00	36.802.000,00	48.828.000,00	19.053.100,00	0,00	0,00	92,01%	99,82%	33,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	6.157.800,00	10.788.040,00	5.474.980,00	13.153.490,00	0,00	6.157.800,00	3.768.140,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	34,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	12.000.000,00	11.995.300,00	11.998.400,00	11.876.300,00	0,00	12.000.000,00	8.874.800,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	73,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.697.000,00	14.119.300,00	7.824.200,00	6.039.170,00	11.793.252,00	5.377.700,00	10.272.000,00	6.196.200,00	0,00	0,00	94,40%	72,75%	79,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Barang dan Material	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.300.000,00	5.300.000,00	15.050.000,00	1.450.000,00	11.400.000,00	13.330.000,00	5.150.000,00	13.645.000,00	0,00	0,00	62,58%	97,17%	90,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	36.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	36.592.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.759.000,00	249.285.300,00	300.812.420,00	195.808.885,00	175.812.920,00	225.732.376,00	234.740.696,00	242.276.778,00	0,00	0,00	98,25%	94,17%	80,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.520.000,00	45.519.300,00	45.519.300,00	26.331.285,00	24.586.920,00	18.723.404,00	38.201.396,00	34.009.578,00	0,00	0,00	87,00%	83,92%	74,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	208.239.000,00	203.766.000,00	255.293.120,00	169.477.600,00	151.226.000,00	207.008.972,00	196.539.300,00	208.267.200,00	0,00	0,00	99,41%	96,45%	81,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.220.000,00	40.860.000,00	65.937.600,00	183.838.350,00	137.730.000,00	22.768.800,00	36.537.400,00	41.747.116,00	0,00	0,00	75,34%	89,42%	63,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	25.000.000,00	35.830.000,00	58.480.000,00	69.388.000,00	67.740.000,00	17.968.800,00	32.967.400,00	38.937.116,00	0,00	0,00	71,88%	92,01%	66,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Operasional atau Lapangan																	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.220.000,00	5.030.000,00	7.457.600,00	9.460.000,00	10.000.000,00	4.800.000,00	3.570.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	91,95%	70,97%	37,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	104.990.350,00	59.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	152.477.000,00	113.674.200,00	447.673.785,00	199.129.605,00	214.774.900,00	111.388.300,00	94.557.200,00	381.351.060,00	0,00	0,00	73,05%	83,18%	85,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	5.000.000,00	4.998.800,00	2.250.000,00	4.080.000,00	7.530.000,00	3.900.000,00	4.420.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	78,00%	88,42%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	4.998.800,00	2.250.000,00	4.080.000,00	7.530.000,00	3.900.000,00	4.420.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	78,00%	88,42%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dapat dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	4.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Peningkatan efektifitas pelayanan pelayanan	4.999.000,00		0,00			4.760.000,00		0,00	0,00	0,00	95,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	10.000.000,00	14.050.000,00	153.114.707,00	33.473.000,00	38.610.000,00	9.719.800,00	11.157.600,00	135.487.260,00	0,00	0,00	97,20%	79,41%	88,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5.000.000,00	14.050.000,00	153.114.707,00	33.473.000,00	38.610.000,00	4.850.000,00	11.157.600,00	135.487.260,00	0,00	0,00	97,00%	79,41%	88,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan pemeliharaan sarana da fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	137.477.000,00	94.625.400,00	292.309.078,00	161.576.605,00	168.634.900,00	97.768.500,00	78.979.600,00	243.613.800,00	0,00	0,00	71,12%	83,47%	83,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	137.477.000,00	94.625.400,00	292.309.078,00	161.576.605,00	168.634.900,00	97.768.500,00	78.979.600,00	243.613.800,00	0,00	0,00	71,12%	83,47%	83,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	44.204.000,00	71.242.715,00	134.341.600,00	74.337.000,00	125.283.900,00	37.083.600,00	66.039.300,00	107.103.600,00	0,00	0,00	83,89%	92,70%	79,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	34.204.000,00	13.468.000,00	73.256.000,00	19.912.000,00	27.060.000,00	30.564.000,00	13.157.200,00	59.233.600,00	0,00	0,00	89,36%	97,69%	80,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	4.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29.479.000,00	13.468.000,00	73.256.000,00	19.912.000,00	27.060.000,00	26.994.000,00	13.157.200,00	59.233.600,00	0,00	0,00	91,57%	97,69%	80,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.000.000,00	57.774.715,00	61.085.600,00	19.025.000,00	46.768.900,00	6.519.600,00	52.882.100,00	47.870.000,00	0,00	0,00	65,20%	91,53%	78,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	0,00	35.549.000,00	57.845.600,00	15.450.000,00	35.553.900,00	0,00	35.419.000,00	47.870.000,00	0,00	0,00	0,00%	99,63%	82,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5.000.000,00	22.225.715,00	3.240.000,00	3.575.000,00	4.225.000,00	4.569.600,00	17.463.100,00	0,00	0,00	0,00	91,39%	78,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.990.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	0,00	0,00	0,00	35.400.000,00	51.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	7.800.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0,00	0,00	0,00	7.140.000,00	4.550.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	15.540.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	4.225.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	4.225.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0,00	0,00	0,00	12.660.000,00	10.890.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	28.725.000,00	46.350.200,00	58.413.000,00	48.540.000,00	66.840.000,00	23.655.000,00	38.976.200,00	30.720.000,00	0,00	0,00	82,35%	84,09%	52,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.725.000,00	10.350.200,00	10.413.000,00	8.940.000,00	18.840.000,00	1.155.000,00	2.976.200,00	0,00	0,00	0,00	24,44%	28,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.725.000,00	10.350.200,00	10.413.000,00	8.940.000,00	18.840.000,00	1.155.000,00	2.976.200,00	0,00	0,00	0,00	24,44%	28,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24.000.000,00	36.000.000,00	48.000.000,00	39.600.000,00	48.000.000,00	22.500.000,00	36.000.000,00	30.720.000,00	0,00	0,00	93,75%	100,00%	64,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	24.000.000,00	36.000.000,00	48.000.000,00	39.600.000,00	48.000.000,00	22.500.000,00	36.000.000,00	30.720.000,00	0,00	0,00	93,75%	100,00%	64,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	57.000.000,00	96.785.200,00	112.035.600,00	116.788.600,00	154.410.000,00	46.110.000,00	83.645.100,00	91.235.400,00	0,00	0,00	80,89%	86,42%	81,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	57.000.000,00	96.785.200,00	112.035.600,00	116.788.600,00	154.410.000,00	46.110.000,00	83.645.100,00	91.235.400,00	0,00	0,00	80,89%	86,42%	81,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	53.750.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0,00	34.039.400,00	35.489.200,00	39.820.000,00	0,00	0,00	26.489.400,00	35.350.000,00	0,00	0,00	0,00%	77,82%	99,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	32.000.000,00	19.835.000,00	40.471.800,00	37.019.600,00	43.000.000,00	23.510.000,00	16.018.200,00	30.175.400,00	0,00	0,00	73,47%	80,76%	74,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	0,00	9.214.000,00	10.654.600,00	9.385.000,00	17.580.000,00	0,00	7.800.000,00	6.510.000,00	0,00	0,00	0,00%	84,65%	61,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0,00	33.696.800,00	25.420.000,00	30.564.000,00	40.080.000,00	0,00	33.337.500,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00%	98,93%	75,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	60.208.000,00	63.932.600,00	63.723.020,00	51.323.900,00	59.700.000,00	51.205.600,00	58.054.600,00	48.420.800,00	0,00	0,00	85,05%	90,81%	75,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.208.000,00	63.932.600,00	63.723.020,00	51.323.900,00	59.700.000,00	51.205.600,00	58.054.600,00	48.420.800,00	0,00	0,00	85,05%	90,81%	75,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.950.000,00	18.250.000,00	15.799.600,00	13.394.800,00	17.580.000,00	11.415.000,00	16.634.800,00	10.840.000,00	0,00	0,00	76,35%	91,15%	68,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.950.000,00	11.700.000,00	17.873.400,00	13.394.800,00	17.580.000,00	11.995.000,00	8.030.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	80,23%	68,63%	43,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30.308.000,00	33.982.600,00	30.050.020,00	24.534.300,00	24.540.000,00	27.795.600,00	33.389.800,00	29.780.800,00	0,00	0,00	91,71%	98,26%	99,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Cilengkrang, 2025

Dari data yang menampilkan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Cilengkrang mulai dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024. Dari tabel tersebut menyajikan informasi bahwa rata-rata Rasio capaian kumulatif sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar 82,03%, angka tersebut diperoleh dengan cara melakukan rata-rata nilai Rasio Capaian, berikut disajikan cara menghitungnya :

$$= \frac{(RC\ Keg\text{-}1 + RC\ Keg\text{-}2 + RC\ Keg\text{-}3 + RC\ Keg\text{-}4 + \ldots + RC\ Keg\text{-}N)}{\text{Jumlah indikator}}$$

$$= \frac{(\ 2.813{,}00\ \%\ )}{40\ \text{Kegiatan}}$$

$$= 70{,}33\ \%$$

Keterangan :

RC Keg-1	: Rasio Capaian pada Kegiatan ke 1
RC Keg-2	: Rasio Capaian pada Kegiatan ke 2
RC Keg-3	: Rasio Capaian pada Kegiatan ke 3
RC Keg-4	: Rasio Capaian pada Kegiatan ke 4
RC Keg-N	: Rasio Capaian pada Kegiatan ke N

Dari diatas, dapat terlihat bahwa pencapaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Cilengkrang Tahun 2021-2026. Pada tahun 2024 hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) yang dilakukan Tim Sakip Kabupaten Bandung, Kecamatan Cilengkrang mendapat nilai sakip sebesar 72,06 poin atau sebesar 102,94 % dari target sebesar 70 poin. Dan pada tahun 2023 nilai sakip sebesar 76,08 poin atau sebesar 107,15% dari target sebesar 71 poin. Walaupun dalam Renja Kecamatan Cilengkrang target nilai Sakip telah dinaikan menjadi 73 Poin namun peroleh nilai sakip tetap di atas target yaitu sebesar 104,22%.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Cilengkrang

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung sangat luas, mencakup berbagai pihak yang terkait diantaranya :

- Masyarakat Umum

Masyarakat umum di wilayah kecamatan merupakan salah satu sasaran utama layanan kecamatan. Kecamatan menyelenggarakan berbagai layanan publik bagi warga, terutama berupa pelayanan administratif dan pembinaan yang ditujukan langsung kepada penduduk. Layanan yang

diberikan mencakup pembuatan surat keterangan (misalnya surat keterangan domisili, catatan lahir/mati), pendataan keluarga dan kependudukan, serta fasilitasi kebutuhan dasar warga. Kecamatan juga menerima pengaduan dan aspirasi masyarakat serta memberikan informasi publik (misalnya sosialisasi program pemerintah pusat/daerah). Dalam praktiknya, contoh layanan kepada masyarakat umum meliputi:

a) Pelayanan Administrasi Umum: Pembuatan surat keterangan domisili, surat keterangan usaha, akta kelahiran/kematian, perekaman data penduduk, dan dokumen administrasi lain.

b) Pelayanan Kependudukan: Koordinasi perekaman e-KTP/KK dan update data penduduk; layanan pendaftaran penduduk serta registrasi pendatang.

c) Informasi dan Pengaduan Publik: Penerimaan keluhan warga (misalnya tentang ketertiban, pelayanan publik), mediasi masalah lokal, dan sosialisasi kebijakan baru kepada warga.

d) Bantuan dan Informasi Sosial: Menyampaikan informasi program sosial (PKH, bansos tunai), mendampingi warga miskin/terpinggirkan untuk mendapatkan bantuan, serta mendukung program kesehatan/vaksinasi.

- Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah kelompok sasaran utama lain layanan kecamatan. Kecamatan berperan membina dan mengoordinasikan aparatur desa di wilayahnya. Bentuk layanan kepada pemerintah desa meliputi pendampingan teknis dan administratif, koordinasi perencanaan, serta monitoring pelaksanaan program desa. Secara praktis, layanan tersebut termasuk:

a) Pembinaan Administrasi Desa: Pendampingan penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes), verifikasi laporan pertanggungjawaban, pembinaan tata kelola kantor desa, dan pengesahan rancangan peraturan desa.

b) Koordinasi Musyawarah dan Perencanaan: Fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang), sinkronisasi rencana pembangunan desa dengan rencana kecamatan/kabupaten, serta pemantauan tindak lanjut hasil musrenbang.

c) Pelatihan dan Bimbingan Teknis: Pelatihan manajemen pemerintahan desa, bimbingan penyusunan RPJMDes, pendampingan pengelolaan BUMDes, dan sosialisasi kebijakan desa terbaru.

d) Pengawasan dan Monitoring: Evaluasi kinerja pemerintahan desa, pendampingan pemilihan kepala desa (bila diperlukan), serta pembinaan aparatur (kepala desa) agar sesuai perundang-undangan desa.

- Pelaku Usaha Lokal

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat kecamatan juga menjadi kelompok sasaran layanan kecamatan. Meskipun klasifikasi perencanaan tidak menyebutkan secara eksplisit setiap jenis usaha, nomenklatur pemerintah daerah menempatkan pemberdayaan ekonomi lokal dalam ranah kecamatan. Kecamatan memberikan layanan pendampingan dan koordinasi bagi pelaku usaha lokal berupa:

- Pendampingan UMKM: Pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha bagi pelaku usaha mikro (misalnya pelatihan pembuatan produk/kemasan, pemasaran), serta bantuan dalam proses perizinan usaha skala kecil (misalnya izin kios atau warung, jika diatur).
- Fasilitasi Akses Modal dan Pasar: Koordinasi dengan program koperasi dan lembaga keuangan mikro untuk akses kredit atau modal usaha; membantu pelaku usaha memasarkan produk lokal melalui bazar/ekspo desa-kecamatan.
- Pemberdayaan Ekonomi Komunitas: Memfasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama (KUB/Gapoktan), pelatihan pertanian/ternak skala kecil, serta advokasi insentif daerah bagi usaha lokal.

- Kelompok Rentan

Kecamatan juga menyasar kelompok rentan dalam masyarakat, seperti keluarga miskin, lansia, penyandang disabilitas, anak-anak terlantar, atau korban bencana. Layanan kecamatan kepada kelompok rentan difokuskan pada perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan mereka. Contohnya layanan kecamatan bagi kelompok rentan meliputi:

- Pendataan dan Bantuan Sosial: Identifikasi keluarga kurang mampu; pendataan keluarga penerima manfaat bantuan pemerintah; membantu distribusi bantuan sosial (sembako, tunjangan lansia atau disabilitas) melalui koordinasi dengan dinas terkait.
- Layanan Kesehatan dan Pendidikan Dasar: Fasilitasi program imunisasi balita, kesehatan ibu-anak, dan layanan posyandu; pendampingan beasiswa siswa tidak mampu; koordinasi pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas.

- Program Perlindungan Khusus: Koordinasi penanggulangan bencana untuk melindungi warga rentan (misalnya evakuasi lansia), penyuluhan pencegahan stunting atau kematian ibu/bayi, serta pendampingan pembentukan kelompok usaha mandiri untuk keluarga miskin.

- Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan (misalnya RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, Linmas, ormas keagamaan/kebudayaan) adalah mitra strategis kecamatan dalam pelayanan publik. Klasifikasi nomenklatur memuat pembinaan organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari tugas kecamatan. Layanan kecamatan kepada lembaga kemasyarakatan antara lain :

- Pembinaan Organisasi Lokal: Fasilitasi pelatihan manajemen dan kepemimpinan bagi RT/RW, LPM, PKK, dan Karang Taruna; pembinaan administrasi forum kelompok masyarakat; serta penyuluhan peran lembaga di pembangunan desa-kecamatan.
- Koordinasi Keamanan dan Ketertiban: Mendukung kegiatan Linmas (sektor keamanan lingkungan) melalui pelatihan dan logistik; penyelenggaraan pos keamanan terpadu (PPS) kecamatan; serta forum rutin penanggulangan konflik sosial di tingkat lokal.
- Partisipasi dalam Pembangunan: Mengikutsertakan lembaga kemasyarakatan dalam musrenbang desa/kecamatan dan program gotong royong, serta menerima masukan pembangunan dari ormas/kelompok agama.
- Fasilitasi Kegiatan Sosial Komunitas: Dukungan administrasi dan saran teknis untuk acara budaya/tradisional masyarakat; pengorganisasian kegiatan kolektif (misalnya kegiatan gotong royong desa) yang melibatkan PKK atau ormas setempat.

Setiap bentuk layanan di atas mengacu pada klasifikasi dan nomenklatur perencanaan daerah yang diperbarui dalam Kepmendagri No.900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga secara resmi Kecamatan menyasar berbagai kelompok masyarakat, pemerintahan lokal, pelaku usaha, dan lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan di tingkat kecamatan.

2.1.5 Mitra Kecamatan Cilengkrang dalam Pemberian Pelayanan

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Kecamatan Cilengkrang tidak dapat bekerja secara sendiri, melainkan membutuhkan dukungan serta sinergi dengan berbagai pihak sebagai mitra kerja. Kecamatan Cilengkrang berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan penghubung antara masyarakat dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung yang memiliki kewenangan teknis. Kehadiran mitra ini menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan pelayanan, memperkuat efektivitas program, serta memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Mitra Kecamatan Cilengkrang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Pemerintah Desa

Sebagai perpanjangan tangan kecamatan di tingkat desa, pemerintah desa menjadi mitra utama dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, pelayanan dasar, serta koordinasi pembangunan wilayah.

b. Perangkat Daerah Terkait

Kecamatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung dalam hal pelayanan yang bersifat sektoral, seperti:

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terkait pelayanan administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP, KK, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya yang menjadi kebutuhan dasar Masyarakat.
- Dinas Sosial, dalam penyaluran bantuan sosial, penanganan fakir miskin, penyandang disabilitas, anak terlantar, maupun program kesejahteraan sosial lainnya.
- Dinas Kesehatan, mendukung pelayanan kesehatan masyarakat melalui puskesmas dan posyandu.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mitra utama dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk penguatan kapasitas aparatur desa dan pengelolaan dana desa.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam penanganan bencana alam maupun non-alam, kesiapsiagaan, serta mitigasi risiko bencana di wilayah kecamatan.

- Satuan Polisi Pamong Praja, dalam penegakan perda, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, sebagai mitra dalam perencanaan pembangunan, sinkronisasi program, dan penyelarasan arah kebijakan dengan RPJMD Kabupaten Bandung.
- Dinas Lingkungan Hidup, terkait pengelolaan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, serta pelestarian lingkungan hidup.
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terkait program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (Bangga Kencana).

c. Instansi Vertikal

Instansi vertikal adalah perangkat pemerintahan pusat yang ada di daerah, yang struktur organisasinya langsung berada di bawah kementerian/lembaga, bukan di bawah pemerintah daerah. Meski begitu, dalam praktik pelayanan publik, instansi vertikal sering menjadi mitra penting kecamatan seperti:

- Kepolisian Sektor (Polsek), mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
- Komando Rayon Militer, mitra dalam bidang pertahanan dan ketahanan wilayah.
- Kantor Urusan Agama, mitra dalam pelayanan urusan keagamaan, khususnya pencatatan pernikahan, pembinaan kehidupan beragama, zakat, dan wakaf.
- Kantor Pertanahan/BPN, mitra dalam urusan pertanahan, seperti sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan program pendaftaran tanah sistematis.

Dengan adanya kolaborasi bersama mitra-mitra tersebut, pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Cilengkrang dapat berlangsung lebih terpadu, efektif dan efisien sehingga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Penelaahan RPJMN 2025-2029

RPJMN 2025–2029 disusun sebagai fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang berlaku untuk satu tahun. RPJMN ini juga memuat matriks pembangunan, arah pembangunan kewilayahan, serta panduan strategis bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah (pemda), dan badan usaha dalam menjalankan program pembangunan.

RPJMN 2025–2029 mengelompokkan langkah strategis ke dalam delapan prioritas nasional yang merupakan implementasi langsung dari Asta Cita, yaitu:

a) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

b) Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan ekonomi berbasis sumber daya alam.

c) Mengembangkan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja, serta mendorong kewirausahaan dan industri kreatif.

d) Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta penguatan peran pemuda dan penyandang disabilitas.

e) Melanjutkan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri.

f) Membangun dari desa dan daerah tertinggal guna menciptakan pemerataan ekonomi.

g) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya.

h) Menjaga keseimbangan lingkungan, meningkatkan toleransi antarumat beragama, serta memperkuat harmoni sosial.

Dalam menghadapi tantangan global dan domestik yang semakin kompleks, pemerintah Indonesia menetapkan sejumlah isu prioritas dalam RPJMN 2025-2029. Isu-isu ini disusun untuk memastikan pembangunan nasional berjalan secara berkelanjutan dan mampu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Berbagai sektor strategis, seperti sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi, menjadi fokus utama dalam perencanaan ini. Setiap isu prioritas dirancang untuk memberikan solusi terhadap permasalahan fundamental yang masih menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

RPJMN 2025–2029 menetapkan tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu:

a) Penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5–5 persen.

b) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan indeks modal manusia (IMM) ditargetkan mencapai 0,59 persen.

c) Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, dengan target mencapai 8 persen pada tahun 2029.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, wilayah Pulau Jawa masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pusat ekonomi nasional, Pulau Jawa memiliki beban yang kompleks, mulai dari inefisiensi perkotaan, rendahnya adopsi teknologi dalam industri, hingga ketimpangan infrastruktur dan kerentanan terhadap bencana. Selain itu, permasalahan sosial seperti *mismatch* keterampilan dengan kebutuhan industri, tingginya angka kemiskinan, serta persoalan kesehatan masyarakat seperti stunting dan TBC juga menjadi isu yang harus segera ditangani. Untuk itu, identifikasi isu prioritas dan strategis menjadi langkah penting dalam perumusan kebijakan yang efektif guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Isu Strategis Wilayah Pulau Jawa dalam RPJMN 2025–2029:

Kawasan perkotaan dan metropolitan menghadapi inefisiensi dalam melayani kota itu sendiri dan daerah sekitarnya. Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri yang membuat nilai tambah industri masih rendah. Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi, terutama antarkawasan, serta terdapat kesenjangan ketersediaan infrastruktur frsik dan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di Jawa bagian selatan

Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir selatan Jawa, tanah longsor dan letusan gunung api, banjir rob dan penurunan muka tanah di daerah pesisir utara Jawa. Kesenjangan keterampilan dan *mismatch* pendidikan dengan kebutuhan industri. Prevalensi stunting, wasting, dan *underweigh* masih relatif tinggi Beban kasus TBC tertinggi ada pada wilayah padat penduduk Tingkat kemiskinan rata-rata Jawa masih cenderung tinggi

Isu-isu strategis yang dihadapi Pulau Jawa dalam RPJMN 2025–2029 tidak terlepas dari kondisi yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu, termasuk Kabupaten Bandung. Sebagai bagian dari wilayah Bandung Raya,

Kabupaten Bandung menghadapi tantangan serupa dengan skala yang lebih spesifik sesuai karakteristik wilayahnya. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Pulau Jawa, seperti inefisiensi perkotaan, rendahnya adopsi teknologi industri, kesenjangan infrastruktur, serta ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, juga ditemukan di Kabupaten Bandung, meskipun dengan akar masalah yang lebih kontekstual. Dalam konteks Kabupaten Bandung, tantangan pembangunan utama terkait dengan:

- Belum optimalnya hilirisasi dan diversifikasi industri berbasis sumber daya alam
- Pengembangan pusat pertumbuhan yang belum efisien
- Rendahnya produktivitas masyarakat akibat keterbatasan konektivitas, akses pendidikan, dan layanan kesehatan.

2.2.2 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi pedoman bagi pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kerja Bupati Bandung terpilih, serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan pembangunan daerah.

Perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan tahapan yang penting karena berpengaruh langsung terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan pada tahapan selanjutnya. Untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi kabupaten bandung beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pembangunan utama di Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan misi 3 “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel” yaitu:

1. Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan

Tabel 2.7 Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah

Urutan Prioritas	Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah
1.	Reformasi birokrasi yang masih butuh peningkatan dalam rangka menghadapi *dynamic government*
2.	Implementasi SPBE yang belum sepenuhnya stabil, dengan masih adanya tantangan dalam integrasi sistem digital pemerintahan
3.	Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi transparansi, akuntabilitas, maupun partisipasi masyarakat

Sumber : Hasil Analisis Bapperida 2025

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Kabupaten Bandung masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Salah satu tantangan utama adalah kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Selain itu, reformasi birokrasi juga menjadi perhatian karena masih diperlukan peningkatan dalam menghadapi perubahan dinamika pemerintahan yang semakin kompleks di era digital. Salah satu langkah penting untuk mengatasi tantangan ini adalah mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang masih menghadapi kendala dalam integrasi sistem digital. Dengan meningkatkan stabilitas dan koordinasi dalam sistem digital pemerintahan, diharapkan pelayanan publik dapat lebih mudah diakses, responsif, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan transparan.

2.2.3 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota

Pola ruang Kabupaten Bandung merupakan perwujudan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang mengintegrasikan fungsi lindung dan fungsi budi daya secara berimbang dan berkelanjutan. Penetapan pola ruang ini didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Rencana pola ruang tidak hanya memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, namun juga mengakomodasi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi, dan infrastruktur secara terarah. Dalam perencanaannya, pola ruang Kabupaten Bandung terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu kawasan

lindung dan kawasan budidaya, yang dirancang untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan wilayah secara terpadu. Berikut merupakan penjelasan muatan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, Kawasan / Zona Peruntukan di Cilengkrang diantaranya untuk :

– Kawasan Lindung: Sebagaimana disebutkan, Cilengkrang masuk Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Bandung.

– Kawasan Budidaya – Pertanian : Seluruh lahan non-lindung di Cilengkrang direncanakan untuk fungsi pertanian. Perda mengklasifikasikan wilayah ini sebagai bagian Kawasan Tanaman Pangan (luas ±22.582 ha), Kawasan Hortikultura (±13.482 ha), dan Kawasan Perkebunan (±39.445 ha). Dengan demikian, kegiatan pertanian (pangan, buah/ sayur, dan perkebunan) diprioritaskan di Cilengkrang.

– Kawasan Pariwisata : Meskipun Cilengkrang bukan zona pariwisata terpisah di peta utama, beberapa objek wisata alam di kecamatan ini diakomodasi dalam tata ruang. Misalnya, Curug Cilengkrang (air terjun) dan Perkebunan Kina Gede tercantum sebagai tujuan wisata alam. Hal ini menandakan bahwa aspek pariwisata alam di Cilengkrang diakui dalam RTRW.

– Zona Lainnya : Tidak ada peruntukan untuk kawasan industri, permukiman kota khusus, atau zona pertahanan yang secara spesifik disebut di Cilengkrang. Fungsi perumahan/kegiatan perkotaan diatur bersama kawasan terdekat (Cimenyan, Soreang, dan Dayeuhkolot) sesuai pola wilayah perkotaan Kab. Bandung.

Rencana Pengembangan Wilayah (Khusus Cilengkrang)

- Pariwisata : Rencana pengembangan wisata diarahkan pada Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) yang meliputi Cilengkrang dalam DPD Cimenyan–Cileunyi. Artinya, Cilengkrang digabung dengan Cimenyan dan Cileunyi sebagai kawasan pengembangan wisata, sejalan dengan keberadaan objek wisata alam di wilayah ini.

- Pertanian : Pengembangan infrastruktur pertanian (irigasi, jaringan jalan tani, pasar lokal) secara implisit diutamakan, karena Cilengkrang masuk zona utama pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan). Program pengembangan wilayah pada umumnya mendorong penguatan fungsi kawasan ini sebagai lumbung pangan dan hortikultura.

- Lainnya : Aktivitas pendukung seperti penyediaan fasilitas dasar (pelayanan kesehatan, pendidikan) mengikuti skema Pusat Pelayanan Kawasan bersama Cimenyan.

secara keseluruhan, RTRW memfokuskan Cilengkrang pada perlindungan lingkungan dan pertanian, dengan pengembangan terpadu untuk pariwisata alam.

2.2.4 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Analisis terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan proses ilmiah dan strategis yang bertujuan mengevaluasi integrasi prinsip-prinsip lingkungan dalam kebijakan atau rencana tata ruang, dengan menyoroti isu strategis dan rekomendasi perbaikan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Adapun hasil analisis Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Kecamatan Cilengkrang diantaranya :

- Bidang Kesehatan dimana Akses fasilitas kesehatan di Cilengkrang sangat terbatas.
- Air Bersih: Sebagian besar desa di wilayah Cilengkrang masih bergantung pada sumber air permukaan atau sumur.
- Transportasi dan akses pendidikan: Infrastruktur jalan Cilengkrang rawan bencana. Longsor akibat hujan deras, sehingga akses warga terganggu.

Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas maka direkomendasi Strategis KLHS untuk meningkatkan pelayanan kepada masayarakat diantaranya :

A. Penguatan mitigasi bencana lereng: Rehabilitasi lahan kritis dan penghijauan hutan di daerah rawan erosi/longsor (misal lereng Cilengkrang) untuk menstabilkan tanah. Implementasi Rencana Tata Guna Lahan berbasis zonasi rawan bencana (hindari pembangunan di titik kritis) dan peningkatan kapasitas TPT (tembok penahan) di titik kritis.

B. Peningkatan suplai air bersih: Ekspansi jaringan PDAM (pipa bermeter) ke wilayah terpencil Cilengkrang dan pengembangan sumur bor komunal atau SPAM desa sebagai cadangan. Perlindungan hulu mata air (penataan kawasan lindung) agar kualitas/kuantitas air aman.

C. Peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan: Pendirian Puskesmas atau posyandu keliling di dekat pemukiman terpencil, serta

jalur akses jalan yang tahan banjir/longsor ke fasilitas publik. Integrasi rute angkutan desa ke sekolah dan puskesmas agar layanan dasar lebih mudah dijangkau, serta penambakan SMPN Baru dan SMAN.

D. Pengelolaan lingkungan berbasis ekosistem: Menjaga kapasitas tampung lingkungan sekitar Citarum (penataan permukiman, pengelolaan limbah peternakan/rumah tangga) agar tidak memperburuk kualitas air minum dan kesehatan publik. Seluruh rekomendasi KLHS ditekankan pada penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek sosial-ekonomi-lingkungan dalam kebijakan daerah.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi KLHS di atas, diharapkan pelayanan dasar kesehatan, air bersih, pendidikan, sanitasi, dan transportasi di Kecamatan Cilengkrang dapat meningkat tanpa menimbulkan tekanan lingkungan baru.

2.2.5 Permasalahan pelayanan Kecamatan Cilengkrang

Kecamatan Cilengkrang masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar yang berpengaruh terhadap kualitas kinerja dan pelayanan publik. Dari sisi akuntabilitas kinerja, capaian kinerja kecamatan masih berada pada peringkat BB dengan nilai 79,80, sementara pengelolaan barang milik daerah baru mencapai 83,6 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kecamatan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi, terutama dalam aspek tata kelola, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu akar masalahnya adalah kapasitas kecamatan yang belum optimal dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi pemerintahan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana juga menjadi faktor penghambat peningkatan kinerja.

Dari sisi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, capaian kinerja pelayanan kecamatan masih belum optimal. Hal ini tercermin dari pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atau e-SKM yang baru mencapai 84,00. Keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Di sisi lain, masih kurangnya personil yang memahami Standar Pelayanan Minimum (SPM) juga turut memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Selain itu, dalam hal tata kelola pemerintahan desa, persentase desa yang mendapatkan pembinaan dari kecamatan belum sepenuhnya memadai. Rendahnya pemahaman perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terus berkembang menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas tata kelola pemerintahan desa.

Secara keseluruhan, permasalahan ini saling terkait antara aspek kinerja, pelayanan publik, dan tata kelola desa. Keterbatasan sumber daya, baik anggaran, prasarana, maupun SDM, menjadi akar masalah yang perlu segera diatasi agar Kecamatan Cilengkrang mampu meningkatkan akuntabilitas, memperbaiki mutu pelayanan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa secara lebih optimal.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan kebudayaan serta sosial dan kesejahteraan rakyat yang berkualitas dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka peluang yang ada antara lain:

a) Meningkatnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur kecamatan terhadap penguasaan keahlian (skill) administratif maupun fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

b) Proses dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan berjalan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

d) Meningkatnya koordinasi diantara instansi sektor kecamatan maupun dengan SKPD tingkat kabupaten.

e) Meningkatnya kapasitas kelembagaan sebagai SKPD dengan didukung oleh kebijakan dan penganggaran dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

f) Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang penting dalam penetapan keberhasilan Kantor Kecamatan Cilengkrang. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. Untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini melalui tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut :

a) Refleksi Organisasi

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal dan Analisia Lingkungan External. Untuk itu Kecamatan Cilengkrang perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya *controllable* (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya *uncontrollable* (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan) *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) atau disingkat dengan analisis SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan (*scanning*) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kantor Kecamatan Cilengkrang seperti tabel berikut :

Tabel 2.8 Analisis SWOT

Kekuatan (*Strengths*)	Kelemahan (*Weaknesses*)
1. Jumlah pegawai yang memadai 2. Sebagai SKPD memiliki sebagian kewenangan Bupati 3. Uraian tugas yang jelas 4. Kesadaran akan Tupoksi masing-masing 5. Memiliki 6 Desa	1. Kualitas SDM kurang 2. Minimnya alokasi anggaran 3. Sarana prasarana kantor kurang memadai 4. Motivasi kerja pegawai kurang (naik turun) 5. Rendahnya kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Desa
Peluang (*Opportunities*)	Ancaman (*Threats*)
1. UU No. 23 Tahun 2014. 2. Janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. 3. Dukungan program reformasi birokrasi dari pemerintah pusat/daerah untuk	1. Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk) yang besar 2. Harapan masyarakat yang terus meningkat, melebihi kapasitas layanan yang tersedia.

Kekuatan (*Strengths*)	Kelemahan (*Weaknesses*)
peningkatan kualitas layanan publik. 4. Pemanfaatan teknologi informasi (e-government) untuk mempercepat proses layanan. 5. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah 6. Potensi SDA yang belum tergali	3. Keterbatasan anggaran operasional kecamatan, menghambat peningkatan sarana dan SDM. 4. Gangguan teknis sistem informasi menyebabkan pelayanan terhambat. 5. Kritik publik di media sosial dapat menciptakan persepsi negatif jika tidak segera ditangani.

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Cilengkrang 2025

Maka dari itu guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah strategi agrersif artinya organisasi harus lebih produktif dalam melaksanakan ativitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	2	3	4
	Akuntabilitas Kinerja	Kinerja kecamatan Cilengkrang masih di peringkat BB dengan Nilai 79,80 serta pengelolaan barang milik daerah hanya mencapai 83,6 persen	1. kecamatan belum menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi, seperti tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas secara optimal 2. Belum optimalnya kapasitas kecamatan dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi pemerintahan 3. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana untuk pelaksanaan kinerja
	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Pencapaian kinerja pelayanan kecamatan cilengkrang masih kurang	Keterbatasan anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat di laksanakan, dan kurangnya personil yang memahami standar pelayanan minimum (SPM)

	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		terlihat pencapaian e skm baru mencapai 84,00	
	Tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa yang dibina	Pemahaman perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa akan peraturan perundang-undangan yang dinamis masih rendah

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Cilengkrang 2025

2.2.6 Isu Strategis

Isu strategis kecamatan tahun 2025–2029 adalah permasalahan utama yang bersifat mendasar, prioritas, dan berdampak luas terhadap pembangunan wilayah kecamatan dalam kurun waktu tersebut. Isu-isu ini menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan, serta harus selaras dengan arah kebijakan kabupaten/kota dan provinsi. Adapun Isu Strategis Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025-2029 diantaranya :

Tahap berikutnya berdasarkan Analisis Lingkungan Internal dan Analisia Lingkungan External tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi *critical succes faktor* dengan membagi kedalam 4 strategi dengan mempertimbangkan posisi Kantor Kecamatan Cilengkrang yang dalam uraian diatas lebih cocok menerapkan strategi agersif, adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10 Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

No.	Strategi	Penjelasan
a.	Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)	1) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan Program Gubernur dan Bupati 2) Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi 3) Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan Tupoksi 4) Menggunakan pedoman dan juknis menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten. 5) Memanfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah.

No.	Strategi	Penjelasan
		6) Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada. 7) Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih 8) Mengoptimalkan kinerja 6 Desa untuk memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati dalam membangun daerah.
b.	Strategi ST (Memanfaatkan Kekuatan Untuk Menghadapi Ancaman)	1) Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kwalitas aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa. 2) Memanfaatkan Pedoman dan Juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar Instansi/daerah 3) Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai sarana dan prasarana serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan.
c.	Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)	1) Memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati untuk meningkatkan jumlah anggaran dalam upaya melengkapi sarana prasarana kantor. 2) Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan Pemkab dan otonomi daerah. 3) Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan Pemkab dan bintek yang ada 4) Perlu ada kebijakan pemkab untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peninkatan alokasi anggaran. 5) Kembangkan sistim informasi manajemen pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
d.	Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)	1. Kurangnya tenaga pelaksana yang definitif untuk mempermudah dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat.

No.	Strategi	Penjelasan
		2. Sarana dan prasarana pendukung yang mengarah pada kelancaran proses pemerintahan dan pelayanan masyarakat sudah kurang memadai, yaitu penataan halaman kantor kecamatan dan kondisi bangunan gedung kantor kecamatan Cilengkrang harus sudah di laksanakan pembangunan rehab berat. 3. Beberapa sektor PAD masih belum memenuhi target yang semestinya, perlu optimalisasi melalui intensifikasi pajak daerah dan retribusi. 4. Tujuan pelimpahan kewenangan belum seimbang dengan kondisi yang ada, terutama sumber daya manusia 5. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima. 6. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan. 7. Perkembangan IPTEK yang pesat tidak diimbangi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya. 8. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen. 9. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Cilengkrang 2025

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, sebagai berikut :

Tabel 2.11 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Cilengkrang

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelayanan Publik Tingkat Dasar	Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai	Peningkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan adaptif	Tranformasi Digital	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi dan penyelundupan	Tata Kelola Pemerintahan yang Transformatif	Peningkatan Kualitas SDM yang transformastif, inovatif dan akutabel
						Peningkatan kapasitas kecamatan dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi pemerintahan
						Peningkatan kapasitas kecamatan dalam menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi, seperti tata kelola yang baik, dan akuntabilitas yang berkualitas
	kualitas pelayanan publik yang masih perlu di tingkatkan	Peningkatan kelembagan yang bersih dan transparan	Tranformasi Digital	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Penguatan kelembagaan dalam pelayanan publik
	Pengelolaan keuangan dan adminitrasi desa yang belum optimal	Peningkatan pembangunan kewilayahan yang adil dan merata	Tranformasi Digital	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dan adminitrasi desa

Sumber : Hasil analisis Kecamatan Cilengkrang

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

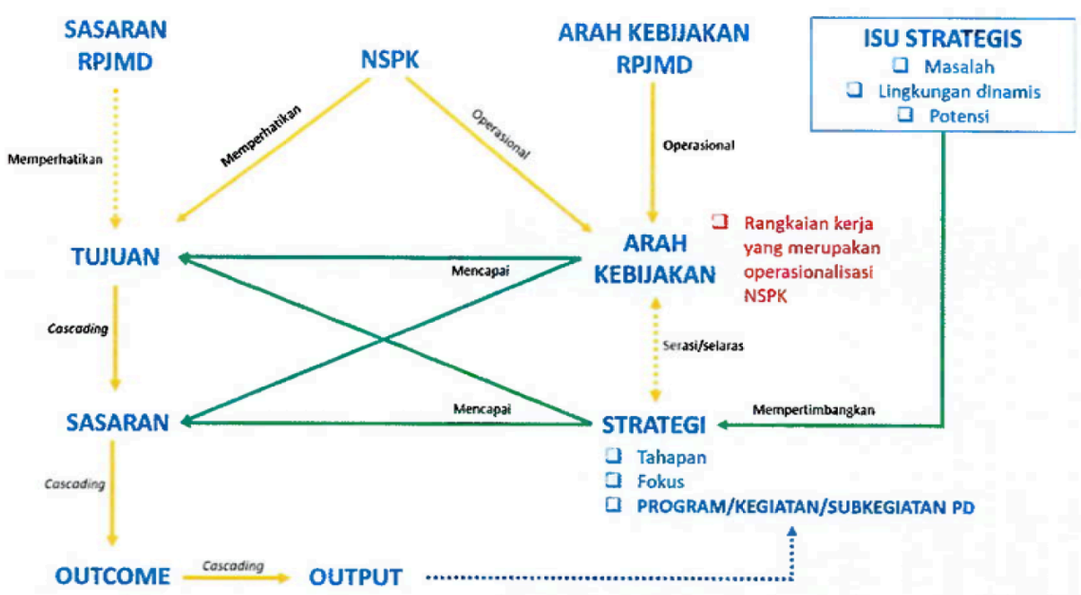
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cilengkrang Kab. Bandung 2025-2029

3.1.1 Tujuan

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun untuk jangka waktu lima tahun, selaras dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Renstra Perangkat Daerah didasarkan pada pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta *bottom-up* dan t*op-down planning*, guna memastikan perencanaan yang aspiratif, akuntabel, dan terintegrasi.

Konsep dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah menerjemahkan visi, misi, dan tujuan kepala daerah ke dalam sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan sektor tertentu di tingkat perangkat daerah, serta menjadi landasan dalam penyusunan dokumen rencana kerja tahunan (Renja), penganggaran, dan evaluasi kinerja.

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Sumber : Renstra PD menurut Inmendagri 2 Tahun 2025

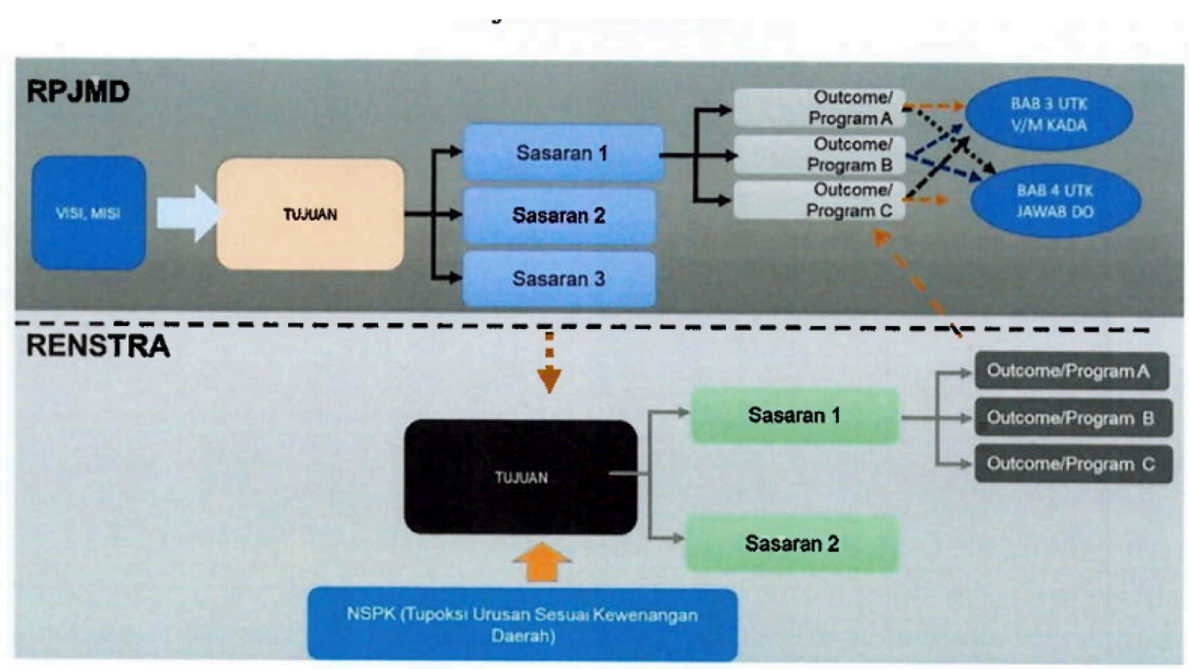
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah didasarkan pada prinsip keterpaduan dan konsistensi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah harus dirumuskan secara selaras dan kontributif terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Kerangka keterkaitan ini menjadi sangat penting agar arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dirancang oleh perangkat daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Secara konseptual, sasaran RPJMD menjadi acuan utama dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Setiap perangkat daerah diharapkan:

- Mengidentifikasi sasaran RPJMD yang relevan dengan tugas dan fungsinya,
- Menerjemahkannya ke dalam tujuan strategis organisasi, dan
- Menyusun sasaran kinerja dan indikator yang terukur sebagai bagian dari proses akuntabilitas kinerja.

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra



Sumber : Renstra PD menurut Inmendagri 2 Tahun 2025

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bandung yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas” Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (Lima) Misi yaitu:

a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Keseteraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak.

b. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan.

c. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.

d. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi.

e. Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Kecamatan Cilengkrang memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi tersebut di atas. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Cilengkrang disusun dengan mengacu pada arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Bandung, dan berpedoman pada visi dan misi Bupati. Penjabaran visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran kecamatan dilakukan dengan mempertimbangkan kewenangan, tugas dan fungsi Kecamatan Cilengkrang, potensi wilayah, serta permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan kecamatan selama periode 2025–2029. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cilengkrang mengacu kepada Tujuan Pembangunan 3: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan sasaran pembangunan: Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien, Sehingga di rumuskan tujuan dan kecamatan yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan Kecamatan Cilengkrang

VISI	Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas	
MISI	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel	
TUJUAN RPJMD	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang baik	
SASARAN RPJMD	Meningkatkan Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	
PROGRAM PRIORITAS	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR
Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, Tata Kelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sumber : Hasil analisis Kecamatan Cilengkrang 2025

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Merupakan indikator keberhasilan pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan responsif. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu prioritas strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang baik mencerminkan komitmen pemerintah daerah, termasuk kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan, dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara profesional, responsif, dan akuntabel.

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari kecepatan dan ketepatan layanan, tetapi juga dari sejauh mana pelayanan tersebut mampu menjawab harapan masyarakat secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya di tingkat kecamatan yang berada pada posisi paling dekat dengan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi agenda strategis untuk membangun kepercayaan warga terhadap birokrasi serta memperkuat legitimasi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan dasar.

Salah satu indikator yang secara langsung merefleksikan kualitas pelayanan publik adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM memberikan gambaran kuantitatif tentang tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap berbagai aspek layanan, seperti kesesuaian persyaratan, kejelasan prosedur, waktu penyelesaian, profesionalisme petugas, kenyamanan sarana, serta penanganan pengaduan.

Oleh karena itu, meningkatnya kualitas pelayanan publik secara konsisten dan terukur akan berdampak langsung terhadap peningkatan laju IKM. Laju IKM menggambarkan tingkat perubahan atau pertumbuhan nilai kepuasan masyarakat dari waktu ke waktu, baik dari bulan ke bulan maupun dari tahun ke tahun. Laju ini menjadi indikator penting untuk mengetahui :

- Efektivitas perbaikan layanan yang telah dilakukan,
- Respons masyarakat terhadap inovasi pelayanan, dan
- Dampak langsung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan penerima layanan.

Laju IKM yang meningkat secara konsisten menandakan bahwa pelayanan publik semakin sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, sementara Laju IKM yang stagnan menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap komponen layanan yang belum optimal. Penurunan laju IKM menjadi peringatan bagi penyelenggara layanan untuk segera melakukan perbaikan terhadap aspek-aspek yang menimbulkan ketidakpuasan, baik dari sisi prosedur, kecepatan, sikap petugas, maupun kenyamanan fasilitas.

Laju IKM dapat dihitung dengan membandingkan nilai IKM pada dua periode berbeda, dengan rumus :

$$\text{LAJU IKM} = \frac{\text{IKM Tahun ini} - \text{IKM Tahun Lalu}}{\text{IKM Tahun Lalu}} \times 100$$

Sebagai contoh, jika nilai IKM tahun sebelumnya adalah 78,00 dan tahun berjalan naik menjadi 82,00, maka:

Laju IKM = (82 - 78) / 78 × 100% = 5,13%

Angka tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kepuasan masyarakat sebesar 5,13% dalam kurun satu tahun. Ini merupakan sinyal positif terhadap efektivitas pelayanan yang dilakukan oleh instansi tersebut. Semakin tinggi laju IKM, semakin menunjukkan bahwa pelayanan publik sudah berada pada jalur yang sesuai dengan harapan Masyarakat. Upaya ini dapat dicapai melalui berbagai strategi dan pendekatan yang berfokus pada pembenahan sistem, peningkatan kompetensi aparatur, dan transformasi budaya pelayanan.

Kecamatan sebagai perangkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan dasar dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, upaya perbaikan kualitas pelayanan terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem, evaluasi berkala, dan kolaborasi lintas sektor.

Dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, diharapkan akan tercipta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatnya partisipasi publik dalam pembangunan, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.

3.1.2 Sasaran

Sasaran dalam Renstra merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan strategis perangkat daerah, yang difokuskan pada hasil-hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sasaran tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, serta menjadi tolok ukur kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan sasaran Renstra dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting, antara lain:

- Visi dan misi kepala daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD;
- Tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sesuai peraturan perundang-undangan;
- Isu-isu strategis dan tantangan aktual yang berkembang di wilayah kerja;
- Ketersediaan sumber daya dan kapasitas organisasi;
- Arah kebijakan nasional dan daerah, termasuk prioritas pembangunan dan reformasi birokrasi.

Sasaran dalam Renstra dirumuskan secara SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound) sehingga dapat diukur pencapaiannya secara objektif. Setiap sasaran disertai dengan indikator kinerja utama (IKU) yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai, serta target capaian tahunan yang menjadi dasar dalam proses evaluasi dan akuntabilitas kinerja.

Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran Kecamatan Cilengkrang, yaitu:

Tabel 3.2 Sasaran Kecamatan Cilengkrang

VISI	Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas			
MISI	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel			
TUJUAN RPJMD	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang baik			
SASARAN RPJMD	Meningkatkan Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien			
PROGRAM PRIORITAS	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, Tata Kelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Cilengkrang 2025

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan

berorientasi pada kebutuhan warga. Sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat wilayah, kecamatan memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya pelayanan dasar yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Kepuasan masyarakat menjadi cerminan dari kualitas layanan yang diberikan. Tingkat kepuasan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kejelasan prosedur pelayanan, kemudahan akses, ketepatan waktu pelayanan, kualitas interaksi petugas dengan masyarakat, serta sarana dan prasarana pendukung. Oleh karena itu, upaya peningkatan pelayanan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek sikap dan budaya kerja aparatur kecamatan.

Dengan pendekatan yang holistik tersebut, kecamatan berupaya menciptakan layanan yang tidak hanya memenuhi harapan masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah sebagaimana amanat PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Hasil survei kepuasan masyarakat (IKM) menjadi alat evaluasi penting untuk mengukur sejauh mana pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ekspektasi warga dan di mana perbaikan perlu dilakukan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

IKM memberikan gambaran obyektif tentang persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik, berdasarkan sejumlah unsur pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan pengguna layanan. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan mencerminkan keberhasilan dalam mewujudkan birokrasi yang melayani dan menjadi bagian dari proses transformasi pemerintahan menuju tata kelola yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan komitmen untuk menjadikan masyarakat sebagai pusat dari setiap kebijakan dan tindakan pelayanan publik.

Secara rinci tujuan dan sasaran Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung termuat dalam tabel 3.3 sebagai berikut.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra
Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2,39	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,02	86,10	86,28	86,53	87,02	87,32	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN RI Nomor 14 Tahun 2017

Sumber : Hasil analisis Kecamatan Cilengkrang, 2025

3.2 Strategi Kecamatan Cilengkrang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025-2029

Strategi Perangkat Daerah merupakan arah kebijakan jangka menengah yang disusun secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Renstra PD. Strategi ini disusun dengan memperhatikan isu strategis, evaluasi kinerja masa lalu, prioritas pembangunan daerah, serta sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan daerah.

Strategi berfungsi sebagai penghubung antara tujuan dan sasaran dengan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) PD. Penyusunan strategi ini juga mempertimbangkan prinsip akuntabilitas kinerja, pengukuran berbasis hasil, serta kemampuan keuangan daerah agar dapat direalisasikan secara realistis dan berkelanjutan. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam kerangka pembangunan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Hal ini diwujudkan melalui pencapaian tujuan Renstra berupa meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan sasaran strategis berupa meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan.

Penahapan pembangunan dalam Renstra Kecamatan Cilengkrang sebagai berikut :

Tabel 3.4 Penahapan Pembangunan Tahun 2026-2030

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana serta mekanisme pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat	Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat serta membangun pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui peningkatan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui penerapan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat yang berkelanjutan
Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan mendorong inovasi berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan

Sumber : Hasil analisis Kecamatan Cilengkrang 2025

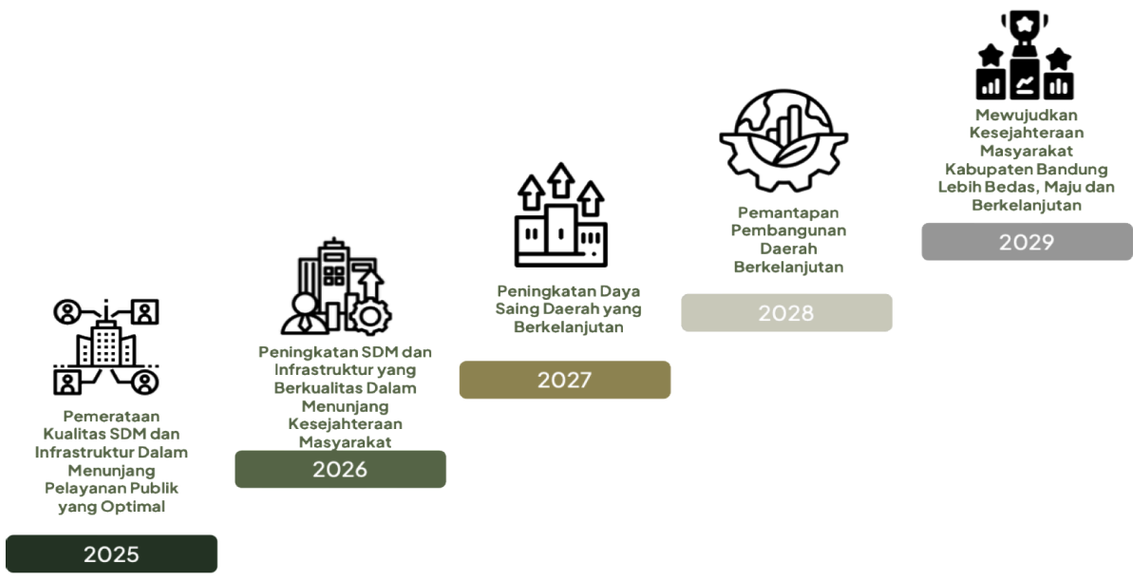
Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya menjadi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mencerminkan kemampuan birokrasi dalam menjawab tantangan pembangunan, menjalankan tugas secara profesional, serta memberikan layanan yang berorientasi pada kepuasan warga. Sebagai penyelenggara pelayanan dasar di tingkat wilayah, Kecamatan memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa seluruh proses pelayanan berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan berkeadilan. Kualitas pelayanan publik yang tinggi akan secara langsung berpengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat, yang pada gilirannya menjadi

indikator keberhasilan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

3.3 Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), setiap perangkat daerah perlu menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang bersifat operasional dan terukur. Agar pelaksanaan Renstra dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan, diperlukan penahapan pembangunan yang terencana dan disesuaikan dengan prioritas tahunan serta kapasitas fiskal daerah.

Gambar 3.3 Tahap Pembangunan Renstra



Sumber : RPJMD Kab. Bandung 2025-2029

Penahapan pembangunan dalam Renstra merupakan proses penjadwalan program, kegiatan, dan sub-kegiatan berdasarkan skala prioritas, urgensi, serta kesesuaian dengan target kinerja yang ingin dicapai pada setiap tahun. Tahapan ini sangat penting untuk menghindari tumpang tindih program, mengoptimalkan sumber daya, serta menjamin bahwa tujuan dan sasaran dapat dicapai secara bertahap dan realistis. Tujuan Penahapan Pembangunan:

1) Menyusun urutan logis pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan capaian indikator kinerja.

2) Menyelaraskan perencanaan tahunan (Renja) dengan target jangka menengah dalam Renstra.
3) Mewujudkan kesinambungan dan konsistensi pelaksanaan pembangunan setiap tahun.
4) Menjamin efektivitas penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan berdampak nyata.
5) Mengantisipasi dinamika perubahan kebijakan, kondisi sosial-ekonomi, dan isu strategis.

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung

NO	Sasaran RPJMD yang Relevan	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan berbasis potensi lokal	Peningkatan pelayanan publik yang responsif, adaptif, transparan, akuntabel dan berbasis digital berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat	

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Cilengkrang 2025

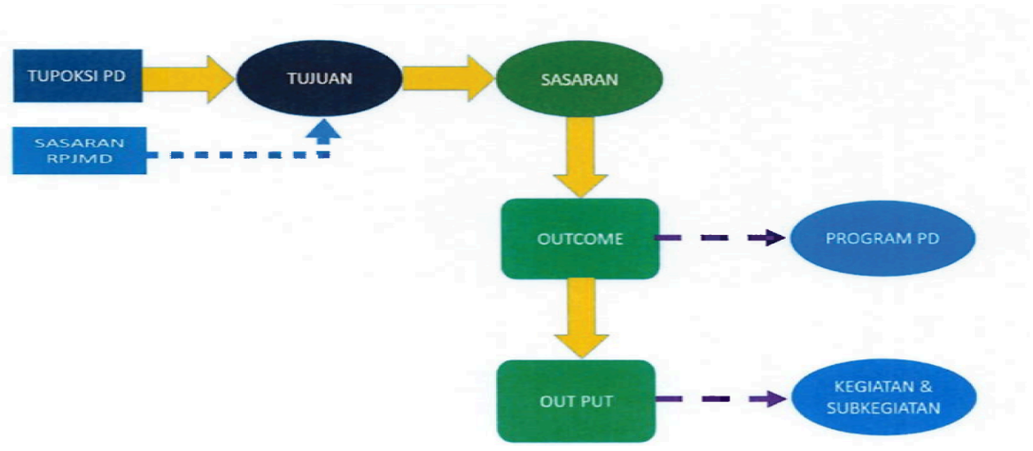
BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025–2029 merupakan bagian krusial dari proses perencanaan pembangunan daerah. Kerangka ini disusun secara sistematis, berbasis data dan kebutuhan, serta mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan daerah, khususnya yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2026–2029.

Tujuan utama dari perumusan program dan kegiatan adalah untuk menjabarkan secara operasional tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah agar dapat diwujudkan secara bertahap, terukur, dan berdampak nyata. Perencanaan tersebut harus mencerminkan keterkaitan logis antara input (sumber daya), output (luaran), outcome (hasil), hingga impact (dampak).

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Kecamatan Cilengkrang



Sumber : Renstra PD menurut Inmendagri 2 Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan dari beberapa strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka Kecamatan Cilengkrang dalam melakukan langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran, sedangkan

Indikator kinerja adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan, target, atau hasil yang ingin dicapai dalam suatu organisasi, proyek, atau kegiatan berhasil diwujudkan. Indikator ini membantu dalam mengukur efektivitas, efisiensi.

Adapun Teknis perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Kecamatan Cilengkrang sebagai berikut :

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Kecamatan Cilengkrang Renstra Pemerintah Kabupaten Bandung

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN RI Nomor 14 Tahun 2017
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Hasil Maturitas Manajemen Risiko (MR) Perangkat Daerah
				Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Bandung
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Terlaksananya Administrasi BMD	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang harus disusun x 100%
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi / Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang harus dipenuhi x 100%
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang telah disusun / Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang harus disusun x 100%
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik / Jumlah Aset Barang Milik Daerah x 100%
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan : Jumlah urusan pemerintahan yang direncanakan x 100%
				Terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan / jumlah kegiatan yang direncanakan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan x 100%
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terlaksana / jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
				Terselenggaranya urusan pelimpahan kepada camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana / Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina / Jumlah Keseluruhan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana / Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang direncanakan x 100%
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Forum Musyawarah dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina / Jumlah fasilitasi dan pembinaan Lembaga kemasyarakatan yang direncanakan x 100%
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
				Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan / Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang direncanakan x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
				Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
				Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
				Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
			Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib		Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah koordinasi penegakkan perda yang berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan / Jumlah koordinasi penegakkan perda yang direncanakan berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana / Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
				Terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan / Jumlah koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan		Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan / Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang direncanakan x 100%
				Terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan	7.01.05.2.01- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				sesuai penugasan Kepala Daerah	Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penugasan Kepala Daerah / Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan		Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa / Jumlah perencanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa
				Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dan diawasi / Total jumlah desa x 100%
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0006 -Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Cilengkrang, 2025

Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Bandung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 - KECAMATAN				5.756.053.962		5.457.541.500		5.512.746.300		5.540.682.600		5.647.034.520	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.135.045.162		4.978.773.300		4.978.773.300		4.978.773.300		4.978.773.300	S.3.1
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	62	5.135.045.162	64	4.978.773.300	66	4.978.773.300	68	4.978.773.300	71	4.978.773.300	
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	42,87	48		52		56		60		64		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				49.627.300		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	
Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	49.627.300	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	2		8		8		8		8		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	2		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	2		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14.362.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	2	14.362.000	8	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.140.400		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.140.400	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.690.400		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	2	5.690.400	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.140.400		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.140.400	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				5.690.400		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	2	5.690.400	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.053.300		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	4.053.300	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.990.400		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	2	8.990.400	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2.280.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	2.280.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				2.280.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	2.280.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.605.926.500		4.605.270.000		4.605.270.000		4.605.270.000		4.605.270.000	
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	12	4.605.926.500	12	4.605.270.000	12	4.605.270.000	12	4.605.270.000	12	4.605.270.000	
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	24		24		24		24		24		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.596.100.000		4.596.100.000		4.596.100.000		4.596.100.000		4.596.100.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	24	4.596.100.000	24	4.596.100.000	24	4.596.100.000	24	4.596.100.000	24	4.596.100.000	
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2.520.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	12	2.520.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.006.500		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	4.006.500	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				3.300.000		4.170.000		4.170.000		4.170.000		4.170.000	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4	4	3.300.000	4	4.170.000	4	4.170.000	4	4.170.000	4	4.170.000	
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.300.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Terlaksananya Administrasi BMD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	3.300.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3.300.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	3.300.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				36.920.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	12	36.920.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	24		24		24		24		24		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				25.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	25.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				11.920.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	12	11.920.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	24	0	24	5.000.000	24	5.000.000	24	5.000.000	24	5.000.000	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				89.136.442		51.703.300		51.703.300		51.703.300		51.703.300	
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	21	6	89.136.442	12	51.703.300	12	51.703.300	12	51.703.300	12	51.703.300	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6	12		6		6		6		6		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	12		12		12		12		12		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	9	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0		1		1		1		1		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.999.600		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	12	5.999.600	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.913.800		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	12	34.913.800	12	17.000.000	12	17.000.000	12	17.000.000	12	17.000.000	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.153.490		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6	12	13.153.490	6	6.000.000	6	6.000.000	6	6.000.000	6	6.000.000	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				11.876.300		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	9	12	11.876.300	12	11.000.000	12	11.000.000	12	11.000.000	12	11.000.000	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.793.252		3.703.300		3.703.300		3.703.300		3.703.300	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9	12	11.793.252	12	3.703.300	12	3.703.300	12	3.703.300	12	3.703.300	
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				0		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	0	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11.400.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	21	6	11.400.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				36.592.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	36.592.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		12		12		12		12		
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				36.592.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	36.592.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				175.812.920		149.300.000		149.300.000		149.300.000		149.300.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	175.812.920	12	149.300.000	12	149.300.000	12	149.300.000	12	149.300.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	12		12		12		12		12		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				24.586.920		23.400.000		23.400.000		23.400.000		23.400.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	12	24.586.920	12	23.400.000	12	23.400.000	12	23.400.000	12	23.400.000	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				151.226.000		125.900.000		125.900.000		125.900.000		125.900.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	151.226.000	12	125.900.000	12	125.900.000	12	125.900.000	12	125.900.000	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				137.730.000		94.500.000		94.500.000		94.500.000		94.500.000	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	10	137.730.000	6	94.500.000	6	94.500.000	6	94.500.000	6	94.500.000	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	8		8		8		8		8		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				67.740.000		69.500.000		69.500.000		69.500.000		69.500.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	8	67.740.000	8	69.500.000	8	69.500.000	8	69.500.000	8	69.500.000	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	10	10.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				59.990.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	59.990.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				214.774.900		228.983.200		324.188.000		332.124.300		458.476.220	S.3.1
Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	85	89	214.774.900	91	228.983.200	93	324.188.000	95	332.124.300	97	458.476.220	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				7.530.000		4.999.000		4.999.000		4.999.000		4.999.000	
Terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	2	7.530.000	4	4.999.000	4	4.999.000	4	4.999.000	4	4.999.000	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7.530.000		4.999.000		4.999.000		4.999.000		4.999.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	2	7.530.000	4	4.999.000	4	4.999.000	4	4.999.000	4	4.999.000	
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				38.610.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000	
Terselenggaranya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	1	2	38.610.000	2	22.000.000	2	22.000.000	2	22.000.000	2	22.000.000	
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				38.610.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	1	2	38.610.000	2	22.000.000	2	22.000.000	2	22.000.000	2	22.000.000	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				168.634.900		201.984.200		297.189.000		305.125.300		431.477.220	
Terselenggaranya urusan pelimpahan kepada camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	3	4	168.634.900	4	201.984.200	4	297.189.000	4	305.125.300	4	431.477.220	
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				168.634.900		201.984.200		297.189.000		305.125.300		431.477.220	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	3	4	168.634.900	4	201.984.200	4	297.189.000	4	305.125.300	4	431.477.220	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				125.283.900		77.000.000		77.000.000		77.000.000		77.000.000	S.3.1
Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	80	84	125.283.900	86	77.000.000	88	77.000.000	90	77.000.000	92	77.000.000	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				27.060.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayan desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	27.060.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				27.060.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	27.060.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				46.768.900		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000	
Terselenggaranya fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	0	1	46.768.900	0	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				35.553.900		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2	35.553.900	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4.225.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	0	1	4.225.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	
7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				6.990.000		0		0		0		0	
Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	0	1	6.990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				51.455.000		38.000.000		38.000.000		38.000.000		38.000.000	
Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	120	51.455.000	30	38.000.000	30	38.000.000	30	38.000.000	30	38.000.000	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	0	0		30		30		30		30		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	0		30		30		30		30		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0	0		30		30		30		30		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	0	150		30		30		30		30		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	0	70		30		30		30		30		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	0	0		30		30		30		30		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	0	60		30		30		30		30		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Keluarga)	0	0		30		30		30		30		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	0	120		30		30		30		30		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0	60		30		30		30		30		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	0	60		30		30		30		30		
7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				0		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	0	0	0	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				0		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0	0	0	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				7.800.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	120	7.800.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03.2.06.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				0		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Keluarga)	0	0	0	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	
7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				4.550.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	0	70	4.550.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	
7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				15.540.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	0	150	15.540.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				4.225.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	0	60	4.225.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	
7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				4.225.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	0	60	4.225.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	
7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	0	0	0	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				4.225.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0	60	4.225.000	30	4.000.000	30	4.000.000	30	4.000.000	30	4.000.000	
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	0	0	30	4.000.000	30	4.000.000	30	4.000.000	30	4.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				10.890.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	0	120	10.890.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				66.840.000		28.725.000		28.725.000		28.725.000		28.725.000	S.3.1
Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	70	78	66.840.000	82	28.725.000	86	28.725.000	90	28.725.000	94	28.725.000	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				18.840.000		4.725.000		4.725.000		4.725.000		4.725.000	
Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	2	18.840.000	2	4.725.000	2	4.725.000	2	4.725.000	2	4.725.000	
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				18.840.000		4.725.000		4.725.000		4.725.000		4.725.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	2	18.840.000	2	4.725.000	2	4.725.000	2	4.725.000	2	4.725.000	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				48.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	9	12	48.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				48.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	9	12	48.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				154.410.000		48.760.000		48.760.000		48.760.000		48.760.000	S.3.1
Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	95	97	154.410.000	98	48.760.000	99	48.760.000	100	48.760.000	100	48.760.000	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				154.410.000		48.760.000		48.760.000		48.760.000		48.760.000	
Terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	300	420	154.410.000	200	48.760.000	200	48.760.000	200	48.760.000	200	48.760.000	
	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	2	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	300	0		300		300		300		300		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	380		0		0		0		0		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				53.750.000		0		0		0		0	
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	380	53.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0		14.760.000		14.760.000		14.760.000		14.760.000	
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	300	0	0	300	14.760.000	300	14.760.000	300	14.760.000	300	14.760.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				43.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	300	420	43.000.000	200	13.000.000	200	13.000.000	200	13.000.000	200	13.000.000	
7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				17.580.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	2	1	17.580.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				40.080.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	40.080.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				59.700.000		95.300.000		55.300.000		75.300.000		55.300.000	S.3.1
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	59.700.000	100	95.300.000	100	55.300.000	100	75.300.000	100	55.300.000	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				59.700.000		95.300.000		55.300.000		75.300.000		55.300.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	6	6	59.700.000	6	95.300.000	6	55.300.000	6	75.300.000	6	55.300.000	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0		4		0		2		0		
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	3	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	6	6		6		6		6		6		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				17.580.000		10.000.000		13.000.000		10.000.000		13.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	6	6	17.580.000	6	10.000.000	6	13.000.000	6	10.000.000	6	13.000.000	
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				17.580.000		13.300.000		18.300.000		13.300.000		18.300.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	6	6	17.580.000	6	13.300.000	6	18.300.000	6	13.300.000	6	18.300.000	
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0		48.000.000		0		28.000.000		0	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0	0	4	48.000.000	0	0	2	28.000.000	0	0	
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				24.540.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	3	1	24.540.000	1	24.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000	

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Cilengkrang 2025

Ket :

S.3.1 = Program yang Mendukung Sasaran KDH: Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien

4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Subkegiatan adalah bagian dari kegiatan, yang mencakup satu jenis layanan kepada masyarakat atau penyelenggaraan pemerintahan, yang dilakukan oleh perangkat daerah. Dalam konteks prioritas pembangunan, subkegiatan diarahkan secara strategis untuk mendukung capaian program prioritas daerah. Uraian sub kegiatan Kecamatan Cilengkrang dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah, sebagai berikut :

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
4.	PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN Pemerintahan Desa	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025

4.3. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan merupakan ukuran kunci atas kinerja strategis kecamatan sebagai unit kerja perangkat daerah yang menjalankan tugas pemerintahan umum dan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

IKU adalah indikator yang menggambarkan hasil utama dari pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan, serta kontribusinya dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra PD. Adapun Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU Kecamatan Cilengkrang sebagai berikut :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kec. Cilengkrang Kab. Bandung

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	2,39	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya

Sumber : Hasil analisis Kecamatan Cilengkrang 2025

4.4. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. IKK menjadi bagian penting dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta digunakan dalam evaluasi kinerja daerah.

Adapun Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025–2029 sebagai berikut :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Kec. Cilengkrang Kab. Bandung

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	2,39	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahuN sebelumnya

Sumber : Hasil analisis Kecamatan Cilengkrang 2025

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Cilengkrang sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bandung, maka Renstra Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.

Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan, setelah uraian mengenai kaidah pelaksanaan menyasar pada pentingnya penguatan kapasitas kecamatan dalam menjalankan peran strategisnya sebagai unit koordinatif, fasilitatif, dan pembina wilayah. Melalui peningkatan reformasi birokrasi, manajemen risiko, kualitas pelayanan publik, serta pembinaan dan pengawasan desa, kecamatan diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif. Dengan demikian, arah kebijakan ini menjadi dasar untuk memperkuat kinerja organisasi, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta mendukung tercapainya pembangunan daerah yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 disusun melalui berbagai tahapan yakni tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Camat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung sebagai penanggungjawab pelaksanaan Renstra Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, dan bersama Bapperida akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.

b. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
c. Renstra Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung akan dijabarkan dalam Renja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung setiap tahunnya. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan program dan kegiatan, maka dalam penyusunannya Renja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bandung.
d. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung setiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas Renstra Kecamatan Cilengkrang dalam mencapai sasaran Renstra.
e. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung diperlukan adanya perbaikan atau perubahan Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan Perubahan Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bandung dilakukan Perubahan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Renstra Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No.900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung di sisa masa perencanaan pembangunan hingga tahun 2029. Dalam implementasinya Renstra akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang, dimana seluruh ketetapan indikator kinerja, indikasi pendanaan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini telah terintegrasi dalam Sistim Informasi Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Cilengkrang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Selain itu setiap tahapan pembangunan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala guna memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan. Pengendalian dilaksanakan melalui mekanisme monitoring internal dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan sistem pelaporan kinerja pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan dalam bentuk evaluasi tahunan, semesteran dan/atau triwulanan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, dan peluang perbaikan. Selanjutnya Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan penyesuaian dan strategi percepatan capaian, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik terhadap kinerja Pemerintah Cilengkrang.

Bandung, September 2025

Camat Cilengkrang

ttd

AGUS RIZAL

BUPATI BANDUNG

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Diagram Penyusunan Renstra PD..... 15

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Cilengkrang..... 26

Gambar 2.2. Peta Wilayah Kecamatan Cilengkrang..... 30

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD..... 86

Gambar 3.3 Tahap Pembangunan Renstra..... 97

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Kecamatan Cilengkrang..... 99

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan Kecamatan Cilengkrang..... 27

Tabel 2.2. Pegawai Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung..... 27

Tabel 2.3 Aset Kecamatan Cilengkrang Periode Desember 2024..... 28

Tabel 2.4 Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cilengkrang Tahun 2021- 2026.....35

Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cilengkrang Tahun 2021- 2026.....35

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung..... 37

Tabel 2.7 Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah..... 74

Tabel 2.8 Analisis SWOT..... 79

Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah..... 80

Tabel 2.10 Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal..... 81

Tabel 2.11 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Cilengkrang... 84

Tabel 3.1 Tujuan Kecamatan Cilengkrang..... 89

Tabel 3.2 Sasaran Kecamatan Cilengkrang.....92

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra..... 94

Tabel 3.4 Penahapan Pembangunan Tahun 2026-2030.....96

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung..... 98

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Kecamatan Cilengkrang Renstra Pemerintah Kabupaten Bandung..... 101

Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Bandung.....116

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program...139

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kec. Cilengkrang Kab. Bandung.....140

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Kec. Cilengkrang Kab. Bandung.....141